



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA  
KOMISI V DPR RI  
DENGAN  
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI**

- Tahun Sidang : 2024-2025  
Masa Persidangan : I  
Rapat Ke- : 3  
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri  
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Rabu, 21 Agustus 2024  
Waktu : Pukul 15.00 s.d 17.53 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK-V)  
Gedung Nusantara DPR RI  
Acara : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran  
2024 Sampai Bulan Agustus 2024,  
2. Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Desa  
(LKPP) APBN TA. 2023,  
3. Lain-lain.  
Ketua Rapat : H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si. (Wakil  
Ketua Komisi V DPR RI/F-Gerindra)  
Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H.,  
(Kepala Bagian Sekretariat Komisi V DPR RI)  
Hadir : A. Pimpinan Komisi V DPR RI:  
1. Lasarus, S. Sos., M. Si. (Ketua Komisi V DPR  
RI/F-PDI Perjuangan)  
2. Ir. Ridwan Bae (Wakil Ketua Komisi V DPR  
RI/F-PG)  
3. H. Andi Iwan Darmawan Aras, S.E., M.Si.  
(Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-Gerindra)  
4. Roberth Rouw (Wakil Ketua Komisi V DPR  
RI/F-Nasdem)  
B. Anggota Komisi V DPR RI:  
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)  
5. Mochamad Herviano  
6. Sri Rahayu  
7. Harvey B. Malaihollo  
8. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos.,  
MCOMN&MEDIAS.T.  
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PG)  
9. Drs. Hamka B Kady, M.S.

10. Dr. H. Ali Mufthi, S.AG., M.Si.

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA  
(F-GERINDRA)

11. Sudewo, S.T., M.T.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-  
NASDEM)

12. Drs. H. Tamanuri, M.M.

13. H. Syarif Abdullah Alkadrie, S.H., M.H.

14. Drs. Soehartono, M.Si

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-  
PKB)

15. H. Ruslan M. Daud, S.E., M.A.P.

16. H. Irmawan, S.Sos., M.M.

17. H. Dedi Wahidi, S.Pd.

18. H. An'im Falachudin Mahrus

19. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

20. Dr. H. Irwan, S.IP., M.P.

21. Willem Wandik, S.Sos.

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F-  
PKS)

22. H. Suryadi Jaya Purnama, S.T.

23. Ir. H. Sigit Sosiantomo

24. Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.

25. KH. Toriq Hidayat, Lc.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

26. H. Boyman Harun, S.H.

27. Hj. Hanna Gayatri, S.H.

28. H. A. Bakri, S.E.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN  
PEMBANGUNAN (F-PPP)

29. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

Izin

- : 1. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H. (F-PDI Perjuangan)  
2. Ir. Effendi Sianipar (F-PDI Perjuangan)  
3. Cen Sui Lan (F-PG)  
4. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E. (F-PG)  
5. Ir. Eddy Santana Putra, M.T. (F-Gerindra)  
6. Hj. Novita Wijayanti, S.E., M.M. (F-Gerindra)

- Undangan
- : 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (Dr. Ir. Mochamad Basuki Hadimoeljono, M.Sc.)
  2. Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.
  3. Jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.

**Jalannya Rapat:**

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PU dan Perumahan Rakyat, hari Rabu, 21 Agustus 2024, pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat Siang, dan  
Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,  
Yang terhormat Menteri PUPR beserta jajarannya serta hadirin yang kami hormati,

Mengawali rapat kerja hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat wal'afiat.

Menurut laporan dari Sekretariat, daftar hadir Anggota Komisi V DPR RI yang telah ditandatangani sebanyak 29 orang dari 55 Anggota, dan terdiri dari lebih separuh unsur fraksi sehingga telah memenuhi kuorum.

Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 281, Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkanlah saya membuka rapat kerja pada hari ini, dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1), Rapat Kerja ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 15.00 WIB)  
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Bapak-Ibu sekalian,

Sebelum saya memulai, saya mau, saya ingin memperkenalkan susunan keanggotaan Kapoksi Fraksi PAN, ada perubahan Anggota, ada Anggota baru kita, Anggota baru, saya minta tolong berdiri, Pak Haji Andri Bakri HM., S.E., tolong berdiri, Pak.

**F-PAN (H.A. BAKRI HM., S.E.):**

*Assalamualaikum.*

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Ini Anggota baru Pak Basuki, menggantikan Bapak Mesakh Mirin.

Bapak-Ibu yang kami hormati,

Kami sampaikan kepada Menteri PUPR beserta jajarannya yang telah memenuhi undangan kita pada hari ini, menindaklanjuti surat dari Pimpinan Banggar DPR RI pada tanggal 10 Juni 2024, Perihal: Penyampaian Rancangan Jadwal Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Jadwal Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025, maka hari ini Komisi V DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan mitra kerjanya, dengan agenda membahas:

1. Evaluasi APBN tahun anggaran 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024; dan
2. Laporan keuangan pemerintah pusat APBN tahun anggaran 2023 Kementerian PUPR.

Berdasarkan data yang kami peroleh bahwa realisasi anggaran Kementerian PUPR per 20 Agustus 2024 sebesar 41,72%. Untuk itu, pada kesempatan rapat kerja ini ini, kami perlu mendapatkan penjelasan dari Menteri PUPR tentang upaya-upaya yang harus dilakukan agar penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Selanjutnya, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023, Kementerian PUPR mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Oleh karena itu, dalam kesempatan rapat pada hari ini, kami berharap bisa mendapatkan penjelasan yang komprehensif terhadap upaya-upaya yang ditempuh untuk dapat mempertahankan capaian ini di tahun-tahun mendatang.

Dalam kesempatan ini pula, kami merasa perlu mengingatkan kembali butir kesepakatan rapat kerja dengan Menteri PUPR tanggal 30 Agustus 2023 pada poin 4 yaitu, boleh ditampilkan di layar juga ini mungkin, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR akan menambah alokasi anggaran pada program padat karya tunai tahun Anggaran 2024 minimal sama dengan alokasi anggaran pada tahun sebelumnya, dan juga kesepakatan rapat kerja tahun, tanggal 7 September 2023, ditekankan kembali bahwa Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian PUPR untuk melakukan penyesuaian dalam rangka menambah alokasi anggaran program infrastruktur berbasis masyarakat, minimal sama dengan tahun 2000, tahun Anggaran 2023.

Oleh karena itu, pada rapat kerja hari ini, Komisi V DPR RI hendak mendapatkan penjelasan dari Menteri PUPR terkait pelaksanaan dan kesepakatan yang telah kita bangun bersama selama ini.

Beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian dari Kementerian PUPR antara lain:

1. Perlunya Kementerian PUPR tetap mendukung dan meningkatkan program padat karya tunai dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan;

2. Agar kegiatan pembangunan infrastruktur, dasar khususnya yang dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak, dapat terselesaikan tepat waktu;

3. Kementerian PUPR agar mendukung kegiatan prioritas seperti peningkatan konektivitas antar wilayah, penanggulangan banjir dan bencana alam, peningkatan pasokan air baku, serta meningkatkan penyediaan perumahan dalam rangka mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN periode berikutnya;

4. Kementerian PUPR agar terus melanjutkan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur kawasan strategis seperti IKN, KSPN, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan industri.

Bapak-Ibu yang berbahagia,

Demikian pengantar dari kami.

Selanjutnya kepada Menteri PUPR, kami persilakan untuk menyampaikan penjelasan sesuai dengan agenda rapat kita pada hari ini....

**F-PKS (IR.H. SIGIT SOSIANTOMO):**

Pimpinan, kanan.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Ya, silakan Pak Sigit.  
Maaf, Pak.

**F-PKS (IR.H. SIGIT SOSIANTOMO):**

Interupsi sebentar ya.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Silakan, Pak.

**F-PKS (IR.H. SIGIT SOSIANTOMO):**

Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan, kemarin kita mengadakan rapat internal, dan dipimpin oleh Ketua Komisi. Seingat saya, Ketua Komisi tidak merencanakan untuk tidak hadir pada rapat ini.

*Nah*, tetapi sekarang saya lihat tidak ada Ketua Komisi di sini, ada apakah gerangan ya? Kalau kita tidak ada Pak Menteri kan, kita juga menanyakan, kenapa Pak Menteri enggak hadir-hadir *gitu*. Tadi kita sudah mau mulai rapatnya, ada Bu Sri, ada saya, ada Bu Dirjen, tadi sudah kita memulai rapatnya, tapi kan demikian juga ini dengan Pak Ketua, ke mana? Kami ingin, apa namanya, ada jawaban.

Yang kedua, yang tahun 2023, atau kesepakatan 2024, tadi enggak ada tayangannya, ya minta tolong ditayangkan *dong*.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Coba ditayangkan *tuh* Mas, tadi sudah kayaknya, cuman lebih keras lagi, atau perlu, perlu kami bacakan ya, Pak ya.

**F-PKS (IR.H. SIGIT SOSIANTOMO):**

Iya, terima kasih.

Yang... yang ketiga begini, Pak Ketua.

Kami di sini, duduk sebagai Anggota DPR itu diutus oleh fraksi, dalam hal ini kami diutus oleh Fraksi PKS. Jadi bukan karena saya, bukan karena sekolah saya, maka saya masuk Komisi V atau bukan karena saya dari Dapil Surabaya, Sidoarjo, maka saya masuk Komisi V, bukan. Kami masuk di sini karena ditunjuk oleh fraksi, mewakili fraksi. Oleh karena itu, Pak Pimpinan, kami berharap dibantu mengkomunikasikan persoalan ini kepada mitra komisi kita bahwa Anggota, saya kira sama dengan Anggota yang lain, pasti dia diutus oleh fraksi ya, karena kita ini Anggota DPR RI, dimana kami berhak untuk mengajukan usulan dan persoalan-persoalan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap kepada Pimpinan untuk menjelaskan sejelas-jelasnya persoalan ini kepada mitra kerja kami, mitra kerja kita semua, saat rapat konsultasi atau saat Pimpinan tanda tangan nota kesepakatan untuk APBN 2024, karena kami merasa hak kami sebagai Anggota DPR tereduksi. Beberapa usulan kami yang lintas Dapil, tidak ada kabar dan kejelasannya. Jadi, kami bukan Anggota DPRD Sidoarjo dan Surabaya bukan atau DPRD Jawa Timur bukan, tetapi kami adalah Anggota DPR RI.

*Nah*, kami berharap Pimpinan untuk memberikan penjelasan ini sejelas-jelasnya kepada mitra kita, kepada Pak Menteri atau kepada Pak Dirjen atau Bu Dirjen, sehingga jangan sampai ada skema usulan yang sudah kami sampaikan, itu dikaitkan dengan Dapil, maka jadi repot. Pasti, pasti semua fraksi enggak setuju, pasti, saya yakin, dan kalau fraksi enggak setuju, untuk apa juga saya harus ada di sini *gitu*. Oleh karena itu, penjelasan ini, mohon dikuatkan oleh Pimpinan, termasuk saat pembahasan nanti di APBN 2025,

h

sudah *ndak* boleh lagi ada, ada segregasi, ini Dapil ini, Dapil ini, sehingga tidak berhak mengusulkan di Dapil yang lain, enggak boleh ya. Terima kasih. Saya kira ada 3 hal itu. Saya masih mencari-cari Pak Ketua Komisi karena kemarin mimpin rapat internal bersama kami.

Saya kira itu, sebelum kita mulai, karena kalau tidak ada penegasan, penguatan hal ini, untuk apa juga saya duduk di sini? Kita bahas yang ringan-ringan saja urusan Jawa Timur, atau urusan Surabaya dan Sidoarjo, enggak usah urusan nasional.

Terima kasih Pak Ketua, itu saja mengingatkan.

**F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):**

Pak... Pak, interupsi Pimpinan.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Silakan, Pak.

**F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, S.H., M.H.):**

Iya, terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan Komisi V yang saya hormati,  
Rekan-rekan Komisi V,  
Bapak Menteri beserta jajaran,

Saya yang pertama ingin mengingatkan kembali, karena ini sudah berjalan. Pada saat itu, saya masih ingat, ada keputusan kita bersama berkaitan dengan kesimpulan rapat, pada saat itu kita putuskan secara bersama bahwa padat karya yang akan dialokasikan tahun 2023-2024 itu, sama dengan anggaran sebelumnya, tetapi sampai saat ini, apa yang menjadi harapan itu belum bisa terwujud sebagaimana kesepakatan rapat, saya ingin mengingatkan ini.

Yang kedua, ini kaitan tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Sigit, berkaitan dengan, karena ada kebijakan fraksi, tetapi yang saya agak sedikit sampai saat ini, contohnya di Rusun, waktu itu kita berikan kepada daerah lain karena permohonan dari rekan dari satu Anggota DPR sesama fraksi, tetapi waktu itu katanya enggak boleh di luar dari pada Dapil.

*Nah*, daripada proses itu tidak dilaksanakan, kami kembali menyetujui, tapi itu pun sampai saat ini juga enggak turun. Saya kemarin sudah tanya, katanya belum ada, Pak, petunjuk dari pusat. *Nah*, ini gimana kalau seperti ini, ya, artinya ya, kita ini rapat di lembaga resmi, diputuskan secara bersama, karena mitra dari kementerian ini adalah sama dengan mitra di Komisi V. *Nah*,



hasil kesimpulan rapat itu seharusnya kan mengikat untuk kita semua, untuk dilaksanakan. Maka untuk itu, saya mohon kepada Pimpinan untuk ketegasan persoalan ini supaya hal ini menjadi terang benderang bagi kita.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Terima kasih, Pak Syarif.

Saya menjawab Pak Sigit dulu, tadi Pak Ketua Komisi V, Pak Lazarus sedikit kurang enak badan, kemudian menyerahkan kepada kami untuk memimpin rapat ini, Pak Sigit ya.

Kalau menyangkut masa yang disampaikan tadi, kurang lebih sama, Pak Syarif juga, dan mungkin sekarang Pak Robert, yang atau dari Anggota dulu, Ibu Sri Wahyuni, silakan.

**F-PDI PERJUANGAN (SRI RAHAYU):**

Sri Rahayu, Pak.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Sri Rahayu, sudah enggak sabar ini Pak Menteri kayaknya, biar langsung dulu, Pak.

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Saya dulu.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Kasih Anggota dulu ya, Pak.

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Biar tidak panjang lebar kita, biar kita tidak panjang lebar.

**F-PDI PERJUANGAN (SRI RAHAYU):**

Saya sedikit aja, Pak.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Silakan, Bu.

**F-PDI PERJUANGAN (SRI RAHAYU):**

Pimpinan, biasanya belakangan.

Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Komisi V,  
Pak Menteri dan jajaran,

Saya mengingatkan kembali apa yang telah disampaikan oleh Pak Menteri waktu Rapat Kerja bersama kita, bahwa jajaran Pak Menteri diminta untuk melaksanakan apa yang disampaikan, sampai Pak Menteri bilang, tolong ini dipenuhi, ini harga diri saya, sampai *segitu*, tapi pada akhirnya sampai hari ini, ternyata apa yang disampaikan oleh teman-teman itu benar dan bahkan, saya, Bu Diana, yang anggaran Rusun itu, perumahan ya, yang anggaran tahun 2023 sampai hari ini belum terealisasi juga, apalagi yang 2024 *gitu*, demikian juga, *ndak* ada ya Pak ya 2024, 2023 belum, belum ada iya, 2023 belum, ini sudah 2024, dan bulan Agustus *gitu*. Meskipun ada persoalan, saya yakin itu bisa diselesaikan.

Kemudian yang terkait dengan apa yang disampaikan, apa yang sampaikan Pak Sigit itu betul-betul merugikan kita dan merugikan orang ataupun Caleg ataupun partai yang berada di mana, meskipun di luar Dapil kita masing-masing, itu sangat-sangat merugikan mereka, karena mereka pasti janji, dan sampai hari ini, info yang kami terima bahwa selesaikan dulu punya Anggota Dewan yang ada di Dapil. Padahal, kemarin yang kita punya, itu tentu akan, tidak hanya di Dapil, tapi ada di luar Dapil. Tolong ini benar-benar diselesaikan, Pak, kalau tidak kita malu, apalagi yang..., yang sudah artinya yang menjadi Caleg terpilih, ini justru pasti akan ditagih untuk itu.

*Nah*, apa yang disampaikan teman-teman, Pak Syarif juga, bahwa kita ini memang dalam di komisi ini kan hanya 54 orang, 54 orang, dan tidak berada pada posisi semuanya ada di provinsi, sehingga, dan Dapil itu pun juga tidak bisa kita jangkau, ya kalau di luar Jawa ada yang Dapilnya mencapai seluruh provinsi, tapi kalau di Jawa Timur itu Dapilnya hanya tiga kabupaten, kadang ada yang lima, dan seterusnya.

Mohon ini menjadi perhatian, kepada Pak Menteri dan untuk kita semua.

Terima kasih, Pimpinan.

h

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Terima kasih, Bu Sri Rahayu, mohon maaf tadi salah dikit namanya.

Saya persilakan kepada Pak Robert.

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

Pak Saudara Menteri dan seluruh jajaran,  
Teman-teman Anggota Komisi V yang saya hormati,

Saya kira sesuai hasil rapat internal kita kemarin, bahwa hari ini kami akan rapat dengan Saudara Menteri PUPR dan seluruh jajaran. Fokus yang akan kami bicarakan adalah evaluasi APBN tahun 2024. Di dalam membahas evaluasi ini, kami kemarin sudah sepakat, bahwa kami minta agar yang dibicarakan adalah program-program yang sudah disepakati dengan Saudara Menteri PUPR dan seluruh jajaran, agar ini menjadi topik kita dan menjadi *stressing* kita untuk hari ini kita bahas, kita tidak masuk ke yang lain-lain.

Maka saya minta kepada teman-teman, kalau setuju, kita minta Saudara Menteri, untuk kita, konsen di sini saja dulu, karena itu poin yang kami sepakati waktu kami bicara internal, di dalam itu, bahwa kami tidak akan ke mana-mana, kami mau selesaikan dulu, karena banyak sekali program-program yang sudah kami berikan, itu belum bisa terlaksana, dan apa yang disampaikan tadi, Pak Sigit, dan teman-teman, kami pun rasakan seperti itu.

Di sini bukan kami perorangan, tapi di sini kami adalah mewakili fraksi, program-program harus kami berikan di fraksi, ya kan. Ada yang tadi juga banyak teman-teman mengeluh, memberikan kepada ketua umumnya, untuk di daerahnya, itu pun ditolak. Maka hal-hal ini yang perlu kami selesaikan hari ini di sini, supaya tidak melebar. Pak Menteri tidak melapor lagi yang lain, kami anggap itu kami bisa terima semua yang lain-lain, tapi kami fokus dulu yang ini.

Maka saya minta kepada Pimpinan nanti, kita fokus di sini saja Pimpinan, agar supaya Pak Menteri tidak, nanti melaporkan yang lain-lain, teman-teman sudah sepakat, kami akan membicarakan satu poin saja yaitu poin tentang kesepakatan yang tadi kami tampilkan, itu hasil rapat kami pada tanggal berapa? 7 ya, itu ya, itu ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, Pak Ketua, saya minta mungkin itu bisa nanti kita bisa lanjut.

Makasih.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Terima kasih, Pak Robert.

Selanjutnya Pak Ridwan Bae.

**F-PG (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Terima kasih, Pak Pimpinan Rapat

Pak Menteri dan seluruh jajarannya,  
Teman-teman Anggota Komisi V yang saya hormati,

Sudah diperdengarkan tadi bahwa memang kemarin ada rapat internal, salah satu yang ketat memang adalah persoalan IBM, tapi kemarin juga sudah dari Fraksi Golkar, bukan apa, dari pandangan seorang Fraksi Golongan Karya, itu saya, mungkin barangkali kita dengarkan dulu, apa yang menjadi, apa namanya, pandangan dari Pak Menteri terhadap yang dilahirkan dalam kesepakatan itu. Jadi dari situ baru kita akan dengarkan, apa sebenarnya kalau dia capai, apa, apa landasannya, *alhamdulillah* tercapai, tapi kalau tidak tercapai, apa juga alasannya, kita dengarkan dulu baik-baik, karena persoalan negara ini, kita tidak kendalikan dengan kesendirian, tapi kita kendalikan yang berbagai kementerian yang ada, ada Kementerian PUPR, ada Kementerian Keuangan, dan seterusnya. Tapi mari kita dengarkan dulu baik-baik, dari penjelasan Pak Menteri, baru kita bersikap.

Barangkali itu, Pak Ketua.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Setuju ya?

**ANGGOTA KOMISI V DPR RI:**

Setuju.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Jadi pada prinsipnya Pak Menteri ,bahwa teman-teman memang men-*stressing* tentang poin-poin kesimpulan rapat kita yang sebelum-sebelumnya. Ada beberapa di antara kesimpulan tersebut yang ternyata sampai dengan per hari ini, belum dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena, itu kami semua, para Anggota Komisi V, sepakat untuk membahas lebih detail atau lebih tertuju

kepada persoalan itu dulu sebelum kita melangkah ke pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Mungkin, kami persilakan langsung ke Pak Menteri menanggapi apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman Anggota, maupun Pimpinan Komisi V.

Saya persilakan, Pak Menteri.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Bapak Pimpinan,  
Ibu-Bapak Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dan yang saya hormati,

Pertama-tama, saya mohon maaf karena rapat kerja ini apa, kita undur sampai jam 3, karena saya harus menurut, saya harus melihat, harus ngecek persiapan PON 2021 di Sumut dan Aceh. *Nah*, itu kami tadi lakukan dari kemarin sore di Medan, dan di Aceh. Di Medan, di Aceh, saya kira dengan 12 *venues* yang kita persiapkan, *alhamdulillah* kelihatannya nanti akan sudah siap pada tanggal 8 untuk pembukaan. Jadi dari lapangan bola, anggar, angkat besi, kemudian kolam renang dan lain-lainnya, yang 12 *venues* progresnya sudah 99, bahkan 100%.

Kemudian untuk yang di Medan, untuk ini sekalian kami laporkan untuk Stadion Medan memang masih 89%, kami akan minta selesaikan tanggal 3 September nanti sebelum tanggal 8 dipakai oleh, atau mereka penutupannya tanggal 20. Sekali lagi mohon maaf, dan terima kasih atas berkenannya Ibu-Bapak sekalian dalam mengadakan rapat pada sore hari ini.

Yang kedua, selamat datang bagi Anggota baru, Pak Bakri, tapi saya pikir saya enggak perlu memperkenalkan tim saya, karena Bapak sudah kenal.

Ibu-Bapak sekalian yang terhormat dan kami hormati,

Sebenarnya ini kalau diminta untuk langsung menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu-Bapak sekalian, tadi di butir 5, alokasi program padat karya tahun 2024 per 20 Agustus yang sebagai hasil tambahan, mungkin ada yang ditampilkan yang padat karya, yang sebelumnya pada Raker-Raker yang lalu ada 7,1 triliun, pada saat ini baru kita dapatkan 8,22 triliun, jadi ada tambahan 1,1 triliun. Namun kemarin pada hari Senin, kami mengadakan Raker untuk membahas ini, masih, ternyata masih ada potensi untuk anggaran yang sisa lelang dan mungkin tidak terserap sekitar 3 triliun, jadi nanti itu akan kita tambahkan ke padat karya. Ini yang pada hasil rapat hari kerja hari Senin kemarin, sehingga nanti *Insyallah* akan menjadi sekitar 10 triliun, untuk 10 lebih triliun untuk padat karyanya. Jadi kalau kami nomor 5 tadi, yang tadinya 7,1 meningkat sebesar 1,1 triliun, dari sebelumnya status 31 Mei 2024.

Sedangkan progres penerapan anggaran PKT per 20 September, 20 Agustus, ada 36,4% dengan penyerapan tenaga kerja 153,05, jadi 153.052 orang. Saya kira kalau padat karya, saya kira mungkin itu yang kami dapat sampaikan bahwa, saat ini ada tambahan 1,1 triliun, tapi hasil Rapat Kerja kemarin hari Senin, ada potensi untuk penambahan padat karya ini sebesar 3 triliun, dan teman-teman Dirjen, saya kira sudah mengusulkan itu untuk tambahan, baik untuk BSPS, maupun buat untuk yang padat karya lainnya. Saya kira itu padat karya yang kami sampaikan.

Kemudian kalau mungkin yang tadi Pak Sigit, butir 3, yang antar Dapil, menurut saya ini adalah internal dari Komisi V, Bapak, kesepakatan Bapak-Bapak dari Komisi V, ini yang kami ikuti, gitu, Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Baik.

Bapak, gimana?

Jadi Pak Menteri, ada beberapa hal selain daripada kuota, jumlah kesepakatan kita yang minimal menyamai jumlah yang tahun 2023 sebelumnya, itu memang belum tercapai dari total anggaran, maupun total jumlah kegiatan. Teman-teman Komisi V berharap bahwa target ini betul-betul dapat kita penuhi dengan harapan bahwa revisi anggaran yang kemarin kita lakukan sebesar 1,1 T itu sudah bisa mengakomodir. Namun, *alhamdulillah* kami mendengar dari Bapak, bahwa sisa lelang pun memberikan potensi tambahan anggaran lagi, sehingga mudah-mudahan jumlah yang kemarin dialokasikan di tahun 2023 itu, dapat dipenuhi di tahun 2024 ini.

Kendala-kendala lain memang betul, dari tahun ke tahun, ada banyak hal ya, khususnya di, di, untuk BSPS. BSPS kemarin itu, memang ada di kesepakatan internal kami, bahwa untuk masuk ke Dapil-Dapil teman-teman Anggota Komisi V, yang ada Anggota Komisi V yang membutuhkan izin dari teman Komisi V tersebut, untuk agar fraksi lain, atau pun Anggota lain bisa mengalokasikan di tempat itu. Ini saya kira tinggal bagaimana komunikasi internal kami kalau menyangkut masalah itu, tapi yang terjadi teman-teman mendapatkan hambatan dari, bukan saja hanya dari BSPS, tetapi dari kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk di antaranya Rusunawa dan lain sebagainya, sehingga kemudian, mohon Pak Menteri bisa memberikan penjelasan juga lebih detail, dan saya kira untuk kesepakatan antara sesama Anggota Komisi V, ini bisa kami selesaikan dengan baik. Mungkin itu, saya mewakili per..., jawab apa, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman.

Pak Robert mau tambahkan, silakan Pak.

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Ya.

Saudara Menteri dan teman-teman sekalian,

Saya kira apa yang disampaikan Pak Menteri tadi soal kesepakatan dari kami, memang waktu itu pernah kami melakukan itu, karena banyak sekali complain, bahwa ada program yang bertumpuk di satu daerah dan kami waktu itu, saya yang pimpin waktu itu pertemuan dengan Saudara Sekjen, menyampaikan bagaimana kami untuk mengatasi itu. Kami sudah sampaikan, bahwa ini ada program yang memang diberikan ke fraksi, maka ada kesepakatan kami, kami buat surat dari fraksi akan itu, bahwa ini benar diberikan dari kepada fraksi, ya kan, yang seperti teman-teman sampaikan itu.

*Nah*, pada waktu itu, persetujuan kami itu, kesepakatan kami sama Saudara Sekjen, ya Saudara Sekjen ya, kesepakatan kami dan kami harap itu yang berlaku. Jadi bukan kami sepakat bahwa tidak ada, tapi kami semua sadar bahwa ada, supaya itu teratur, baik, maka yang diberikan ke mana? ke fraksi, sebagai Pimpinan Fraksi diberikan ini untuk bagi, ya itu ada surat benar ini diberikan ini, maka itu harus bisa dilakukan begitu.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Iya, Pak, jadi yang saya maksudkan dari kesepakatan ya itu tadi. Kalau ada perintah, tapi nanti ada yang Dapilnya Pak Andi di situ, nanti fraksi ada di situ juga, ini yang kami hindari. Jadi mohon Bapak-Bapak juga bisa mengatur itu, karena numpuk di situ. Jadi dari dua Anggota yang berbeda, tapi dengan ternyata numpuk di situ, ini yang kami hindari Bapak.

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Iya, mungkin begini Saudara Menteri, kalau itu kita tidak bisa terhindar, hindari karena ada misalnya di Jawa Timur ya kan, di, karena bukan satu Anggota saja, ya kan, mungkin ada Pak Sigit di situ, tetapi ada juga diberikan kepada fraksi, Pak Sigit kasih di Kota A, Pimpinan Fraksinya kasih juga, ya kan, di situ misalnya, atau di Kota B, ya kan, ini tidak bisa terhindar karena itu haknya fraksi, Ketua Fraksi.

Jadi ini yang saya minta supaya kalau itu surat dari fraksi menyatakan dia di mana, maka itu bisa dilakukan, tidak bisa lagi ditolak, karena hak penuh daripada kami yang duduk di sini semua para Anggota, itu semua ditunjuk oleh fraksi, *gitu*, jadi itu.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Dan kalau kami mohon juga, kalau bisa kuotanya bukan *on top*, kalau *on top*, nanti Bapak-Bapak ada yang berkurang juga. Kuotanya kalau bisa tidak *on top*, bahwa ini fraksi harus sendiri, ini sendiri.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Iya, Pak, kalau persoalan fraksi, saya kira jelas ya, Pak ya, bahwa kebijakan internal fraksi masing-masing itu, Anggota Komisi masing-masing yang akan mengkondisikan fraksinya, saya kira tidak mengganggu kuota yang Bapak berikan. Hanya saja yang teman-teman minta pengalokasian yang ditetapkan oleh fraksi di internal mereka itu, dapat Bapak laksanakan. Jadi bukan maksudnya menambah jumlah kuota fraksi, ataupun menambah jumlah kuota.

Jadi pada prinsipnya hanya misalkan, saya ingin menyimpan aspirasi tersebut berdasarkan perintah fraksi kami ke Dapil Pak Robert, itu bisa dilaksanakan, Pak, dengan izin dari Pak Robert sendiri misalkan. Jadi saya kira sinkronisasi antara sesama Anggota, dan jumlah kuota yang Bapak berikan juga terhadap teman-teman Anggota, ini tidak saling *cross*, tidak, tidak saling mengganggu, hanya tinggal kebijakan dari Pak Menteri dan tentunya teman-teman Dirjen agar supaya hal ini bisa dilaksanakan dengan baik.

Mungkin Pak Menteri mau tambahkan, silakan.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Iya, karena di bawah, kepala balai sering dimarahi juga oleh Bapak-Bapak yang di Dapil sana, *loh* itu kok ada di sana, itu. Jadi pelaksanaannya kayak *gitu*, Pak.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Ya, mungkin yang marah-marah siapa? Atau....

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Eggak Pak, jadi ada di lapangan pasti ada, *gitu*.

**F-PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):**

Interupsi, Pak Ketua.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Harus dihindari, *gitu*.



Prinsipnya, Pak, dari kami, saya tidak akan, enggak ada relevansi sama sekali, *wong* itu punya kita semua *kok*.

**F-PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):**

Izin Pak Ketua, interupsi.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Ya, silakan Pak.

**F-PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):**

Baik.

Terima kasih.

Pak Menteri, Pimpinan dan rekan-rekan Anggota,

Saya kira semestinya ini tidak menjadi masalah, karena pada Agustus tahun lalu, kita menyepakati minimal sama dengan tahun lalu. *Nah*, pengertian saya, Pak Menteri, waktu itu selain jumlah, tentu saja juga mekanisme *gitu*. Mestinya pada tahun ini juga tidak bermasalah sebagaimana tahun 2003, 2022 dan seterusnya *gitu*, karena kita menggunakan kata-kata sama dengan tahun lalu, begitu ya. *Nah*, walaupun ada masalah spesifik misalnya, ada Anggota yang katakanlah seperti tadi marah-marah, mungkin itu spesifik tidak usah diberlakukan secara umum begitu ya, jadi ini yang pertama.

*Nah*, yang kedua, tadi Pak Menteri menyebut ada kata potensi, saya ingin menghapus kata potensi itu, karena namanya potensi inikan belum tergali, *gitu*. Kita ingin agar apa namanya kita tenang begitu setelah selesai rapat, apalagi ada tanda tangan, Pak Menteri, dan seterusnya. *Nah*, ada kata-kata potensi ini terus terang meragukan saya ini, Pak Ketua. Maksud saya, jangan juga kebalik, *gitu*.

Yang kita bahas dan menjadi kesepakatan resmi di sini ditandatangani oleh Pimpinan Komisi dan Pak Menteri, tetapi tidak terlaksana, tapi banyak hal yang sebetulnya tidak pernah kita bahas, misalnya anggaran di IKN, justru itu terlaksana, kan ini kita perlu ada semacam pengertian, Pak Menteri, *gitu*.

Kami memaklumi ada dinamika terkait dengan berbagai macam kebijakan anggaran tetapi yang sudah pasti ini harus lebih, lebih jadi prioritas *gitu* ya yang sudah disepakati, karena jangan sampai hal-hal yang tidak kita bahas, tetapi begitu terlaksana dengan baik, tetapi yang menjadi keputusan, justru tidak terlaksana, ini kan logika yang terbalik *gitu*.

Belum lagi beberapa, katakanlah hasil kunjungan Pak Menteri, ini juga perlu menjadi perhatian secara lisan maupun juga tertulis, Pak Menteri

h

menyampaikan komitmen di daerah-daerah, *gitu*. Saya kira ini juga penting Pak Menteri jadi catatan. Jadi, poin saya menghilangkan kata potensi itu tadi.

Terima kasih.

**F-PKB (NENG EEM MARMHAMAH ZULFA HIZ, M.M.):**

Pimpinan, interupsi, Pimpinan, boleh?  
Terima kasih.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Belum, belum Bu, silakan.

**F-PKB (NENG EEM MARMHAMAH ZULFA HIZ, M.M.):**

Oke, terima kasih.

Pimpinan Komisi V,  
Pak Menteri yang saya hormati beserta jajaran yang yang saya banggakan,

Pak Menteri, ketika Pak Menteri diperintah oleh Presiden, pasti tidak mungkin untuk membantah, begitu juga ketika kami mendapatkan perintah dari fraksi, tidak mungkin kami mampu membantah, ya pilihannya hanya untuk melaksanakannya.

Oleh karena itu, mungkin kepada teman-teman yang di Komisi V, kalau misalkan ternyata ada program Anggota Komisi V lain yang ada di Dapilnya, ya jangan marahinnya ke kementerian, komplain ke Anggota yang di..., di apa, ke Anggota yang memberi program, itu aja, menurut saya seperti itu aja, kayak *gitu*, tetapi bahwa, tetapi yang terjadi begini Pak Menteri. Saya itu kan mengajukan PISEW di Bali, Bali itu tidak ada Anggota Komisi V-nya, *gitu* kan, dan surat apa, minat dari pemerintahan Bali juga sudah oke, sudah, tetapi Pak direktur di Cipta Karya-nya atau... atau bawahnya itu tidak mau melaksanakannya, karena itu bukan Dapil saya. Padahal, di Bali juga kan apa, tidak terlalu banyak program itu, apa, PISEW di sana, seperti itu, dan itu tidak, termasuk juga kemarin kita ngajuin juga di Jambi waktu Pak ini belum, belum ini kan baru kelima, baru sekarang ya, tidak mau melaksanakannya karena apa? katanya ini adalah perintah pimpinan, pimpinan tuh siapa? Ya, dari mulai Bu Dirjen sampai ke atasnya, seperti itu menyampaikannya.

*Nah*, oleh karena itu, seperti halnya Pak Menteri tidak mungkin membantah perintah dari Presiden, begitu juga kami tidak mungkin membantah perintah dari fraksi, seperti itu. Mungkin itu saja, nah solusinya adalah teman-teman yang mungkin ada limpahan dari..., dari Anggota Komisi V yang lain, komplain ke Anggotanya aja, jadi tidak usah komplain ke ke Kementerian. Seperti itu aja, Pimpinan.

Terima kasih.

**F-PKS (IR.H. SIGIT SOSIANTOMO):**

Boleh saya?  
Boleh?

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Pak Sigit, atau ada yang belum, yang lain.

**F-PKS (IR.H. SIGIT SOSIANTOMO):**

Iya, ada, ada, terima kasih.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Oke, Pak Sigit, silakan.

**F-PKS (IR.H. SIGIT SOSIANTOMO):**

Selama ini mekanisme saling konfirmasi antar Anggota sudah terjadi ya. Misalnya Pak Hamka, kirim ke ini, karena memang ada Anggota DPR dari Dapil saya, tapi tidak, Fraksi Golkar, tapi tidak ada di Komisi V, *gitu*, ya saya *welcome*. Malah Pak Hamka, enggak usahlah pakai surat-menyurat, sudah telepon *aja*, *gitu*, saya bilang.

Demikian juga, saya program-program banyak masuk juga ke Dapilnya Bu Novi ya, *ndak* pernah saya dimarahi Bu Novi, senyum-senyum aja Bu Novi, *gitu*. Artinya, kami baik-baik saja, demikian juga saat kami berkunjung ke Sumatera Barat, ada gempa di sana, kami urunan se-Fraksi PKS, urunan 200, 200, atau 100, lupa saya ya, kita kirim ke sana, dan *ndak* ada komplain. Artinya, izin antar teman-teman sudah berjalan.

Nah, mungkin yang kami harapkan, jangan lagi dibatasi oleh..., oleh wilayah. Nanti kami selesaikan sendiri dengan sesama Komisi V, itu yang pertama.

Yang kedua, ada lagi Pak Menteri, Inpres Jalan Daerah, ya bagaimana kabarnya? apakah itu termasuk di angka potensi yang 3 koma sekian itu, ya.

Terima kasih, *matur suwun*.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Pak Sudewo.

**F-PD (DR.H. IRWAN, S.IP., M.P.):**

Izin, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Setelah Pak Sudewo, Dinda, ya.

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Ya, terima kasih.

Pimpinan,  
Pak Menteri dengan seluruh jajarannya yang saya hormati,

Terima kasih sekali, Pak Menteri PUPR sudah memikirkan bagaimana solusi yang dari persoalan yang dihadapi oleh kawan-kawan bahwa pada hari Senin kemarin Pak Menteri sedang rapat, kemudian menemukan solusi ada potensi tambah 3 triliun, itu.

Saya sebenarnya, saya sebenarnya, dengan berat hati harus menyampaikan, bahwa dinamika semacam ini harusnya tidak akan terjadi, karena kita menyepakati sudah pada tanggal 30 Agustus tahun 2023, dan apa yang disampaikan oleh Kementerian PUPR kepada kami, itu sudah gamblang jelas, *gitu*, tidak ada tafsir lagi, bahwa apa yang akan kami jalankan di 2024, itu paling tidak sama dengan di tahun 2023. Ini merupakan ikrar kami juga, bukan hanya kepada Pak Menteri, ikrar kepada masyarakat yang akan menerima program, ini tidak main-main, itu.

Saya kasih contoh program bedah rumah BSPS. Kalau mengacu pada tahun sebelumnya kan, sebanyak 2.000 rumah, kami mendata 2.000 rumah itu, dan mereka sangat berharap, betul-betul itu terealisasi. Penderitaan panjang yang dialami tinggal di satu rumah yang sangat tidak layak, *gitu*, kalau musim hujan bocor, sampai tidak bisa tidur, anak-anak sekolah juga enggak bisa belajar, enggak bisa tidur dengan nyenyak, tidak bisa istirahat dengan baik, pokoknya sangat-sangat tidak layak, dia mengalami penderitaan yang panjang.

Lantas kami data, kami data dengan satu keyakinan, bahwa dia akan mendapatkan program bedah rumah ini. Dia sangat berharap sekali bahkan, mendambakkanlah, supaya bisa merasakan satu hidup yang layak begitu, tapi tiba-tiba program ini menjadi tidak jelas karena sesuatu hal yang terjadi di internal.

Kami sulit untuk menjelaskan kepada mereka. Betul-betul manusiawi saya terusik dengan adanya rintihan harapan besar mereka itu. Kalau memang ini benar-benar sudah disepakati dan terpikirkan jauh sebelumnya, dan pada saat pemaparan awal kalau salah, kalau saya tidak salah ingat, di bulan-bulan Maret, April, atau Mei, presentasi materi yang ditampilkan oleh Kementerian PUPR di masing-masing direktorat itu sudah jelas. Bedah rumahnya sekian, BSPS-nya sekian, P3-TGAI-nya sekian, yang lain-lain sekian itu sudah jelas, yang menjadikan pertanyaan, mengapa dalam implementasi itu, itu jauh berkurang, bukan hanya berkurang, tapi jauh berkurang. Apakah ini sesuatu yang tidak direncanakan dari awal? apakah ini sesuatu yang tidak diniatkan dari awal, sampai bisa terjadi semacam ini, *gitu* ya.

*Nah*, namun demikian ya, namun demikian, ini kan semua sudah berjalan, sudah terjadi, tapi saya sekedar cerita demikian itu, tidak untuk menyalahkan Pak Menteri. Saya hanya berharap supaya Pak Menteri dengan sekuat tenaga, dengan sekuat tenaga merealisasikan ini ya, seluruh program padat karya, baik itu jenis maupun jumlahnya, dengan segala upaya, tambah 3 triliun, itu menurut, menurut Pak Menteri adalah potensi, *gitu*, masih ada satu kemungkinan. Kalau ini ranahnya potensi, Pak, Bapak, mohon maaf, berarti ada potensi yang masih bisa lebih dari 3 triliun. Ini sangat, sangat, saya berharap kepada Pak Menteri. Ini saya kalau tidak dihadapkan pada satu situasi yang sulit di lapangan, kami bertemu dengan masyarakat, tidak mungkin saya sampai curhatan seperti ini kepada Pak Menteri, karena selama ini kami mengapresiasi kinerja Pak Menteri, *gitu*. Ini betul-betul situasi yang sangat sulit kami hadapi di lapangan. Bukan hanya tujuannya untuk elektoral bahwa dengan program-program itu yang kami tawarkan, kami data itu supaya kami itu terpilih kembali, enggak itu. Ini betul-betul adalah rasa kemanusiaan kami.

Begitu kami sudah terpilih melalui masa pemilihan, kami terpilih Kembali, terus kami seolah-olah bebas dari janji dari komitmen begitu terhadap masyarakat sudah tidak ada kepentingan lagi terhadap mereka, bukan, bukan masalah itu. Ini satu komitmen kemanusiaan kami terhadap mereka, terhadap masyarakat. Jadi saya berharap sekali kepada Pak Menteri PUPR, kalau memang bisa digali ada kemungkinan bertambah 3 triliun lagi ya, saya, saya yakin akan bisa lebih daripada 3 triliun. Itu yang pertama

Yang kedua, tolong lebih konkret saja. Tambahan sekian triliun itu akan dialokasikan untuk program apa? dengan jumlah berapa? supaya bisa menjadikan pedoman kami, pegangan kami ya di lapangan, *gitu*. Apakah dari sekian yang akan ada itu nanti prioritasnya untuk BSPS untuk P3-TGAI, atau apa, dengan jumlah yang berapa, itu konkret saja, supaya kami juga mendapatkan pedoman.

Yang ketiga, soal daerah pemilihan.

Soal daerah pemilihan ini sebenarnya tidak logis kalau ini dipersoalkan oleh Eselon I, oleh Eselon II, dan kami rasanya mungkin ya, mungkin, mungkin benar bahwa tidak ada lah di antara kami Komisi V ini yang marah-marah kepada balai atau ini, tapi kalau andai kata lepas daripada itu, ada yang khilaf, satu, dua orang Anggota Komisi V, janganlah dianggap bahwa semua Anggota Komisi V melakukan hal itu, dan jangan langsung dipakai alasan untuk

h

mengoreksi soal penempatan atau alokasi Dapil, karena sudah jelas bahwa kami ini Anggota DPR RI, ada tugas secara keseluruhan dimana kami akan menempatkan masing-masing fraksi punya kebijakan. Fraksi-nya Pak Roberth Rouw, Partai Nasdem, punya kebijakan yang bisa saja berbeda metode berbeda, caranya berbeda dengan fraksi kami dari Partai Gerindra, dan begitu seterusnya. Jadi tidak perlu harus men-*general*-kan kebijakan fraksi itu kepada seluruh fraksi yang ada di sini.

Yang terpenting menurut hemat kami adalah, yang penting menurut hemat kami adalah Menteri Kementerian PUPR yang penting pedomannya satu bahwa kuota Anggota, itu tidak terlampaui, gitu, Anggota-Anggota yang penting tidak terlampaui.

Yang kedua, mau ditaruh di daerah pemilihan mana saja yang penting implementasinya memenuhi standar teknis, standar administrasi, dan standar hukum. Dipertanggungjawabkan, semua apa yang dilakukan program itu, dipertanggungjawabkan. Sesuai spek atau tidak, mutunya bagaimana, atau tidak, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya kira itu yang jadi pedoman untuk masalah penempatan Dapil.

Kami ini sedang sebenarnya, sebenarnya sedang tidak *happy* dengan dengan Eselon I, Eselon II ya, tidak semua memang. Banyak Eselon II yang bagus, banyak Eselon II yang bagus di Kementerian PUPR, tapi ada Eselon I, Eselon II, jika dikomunikasi oleh Anggota Komisi V, dan saya merasakan itu, kayaknya jawabannya enteng-enteng saja, kayak tidak menganggap itu sesuatu yang substantif, tidak menganggap ini sesuatu yang *urgent*. Kalau diberi sesuatu *noted*, *gitu* aja, *gitu*, dicatat *gitu* saja itu. Kalau ada, ada argumentasi, dia pasti dilarikan kepada Pak Menteri PUPR, langsung ke Pak Menteri PUPR, Pak. Saya menunggu Pak Menteri PUPR, memang gampang komunikasi dengan Pak Menteri PUPR? Itu sesuatu yang tidak mudah, komunikasi dengan Pak Menteri PUPR. Kalau dilarikan dengan Pak Menteri PUPR, itu berarti dia jurus menghindar begitu, dan saya yakin Pak Menteri PUPR itu orangnya konsisten, *gitu*, hanya bagaimana di internalnya di situ, masa main-main dengan kewibawaan Pak Menteri PUPR, itu.

Jadi saya sebenarnya itu, ada Anggota, ada Eselon II, Eselon I yang sekiranya itu kayaknya meremehkan terhadap kami *gitu*. Padahal dia itu bisa berjalan, tanpa ada legalitas persetujuan dari Komisi V sebenarnya enggak jalan, tapi kalau kami sudah memberikan legalitas, memberikan persetujuan, seolah-olah kami ini tidak dibutuhkan lagi, dia jalan dengan sendirinya.

Ada program di daerah pemilihan pun jalan dengan sendirinya, apa yang dilakukan di sana, jungkir balik kami tidak pernah diberi tahu, tidak pernah diberi penjelasan, enggak pernah diberi dia apa saja dilakukan. Contohnya semacam itu, banyak sekali.

Jadi saya berharap sekali ini Pak Menteri PUPR, kalau tidak kami dihadapkan pada kondisi yang sulit di lapangan, tidak akan saya curhat sampai seperti ini kepada Pak Menteri PUPR.

Terima kasih.

*Assalamualaikum.*

**F-PG (DRS. HAMKA B. KADY, M.S.):**

Izin Pimpinan, bisa bicara?

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Sebentar Pak Hamka, Pak Irwan Fecho dulu, baru setelah itu Pak Hamka.

**F-PD (DR. H. IRWAN, S.IP., M.P.):**

Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Jangan panjang-panjang, ini belum pembahasan, baru interupsi.

**F-PD (DR. H. IRWAN, S.IP., M.P.):**

Ini interupsi atau pembahasan?

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Belum, Pak, Pak, Pak Menteri belum ada pembahasan.

**F-PD (DR. H. IRWAN, S.IP., M.P.):**

Ya, kalau memang interupsi, saya pikir kita cukupkan.

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Pimpinan, Pimpinan, saya ngomong sebentar.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Sebentar dulu Pak Sudewo.  
Silakan Pak Irwan.

**F-PD (DR. H. IRWAN, S.IP., M.P.):**

Ya, kalau memang ini masih saat interupsi, saya pikir sudah cukup.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Saya kira interupsinya hampir semua sama ya yang kita sampaikan.

Jadi kita lanjutkan dulu Pak Menteri menyampaikan pemaparannya, setelah itu Bapak boleh memberikan tanggapan lanjutan. Pada prinsipnya saya kira sudah bisa dipahami apa yang menjadi interupsinya Pak Menteri, ya. Saya, saya persilakan Pak.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Terima kasih ya, Pak Pimpinan, tapi kalau boleh kami ingin sedikit menanggapi interupsi ini supaya *clear*.

Pertama, tentang potensi. Kalimat potensi ini karena sedang disusun untuk direvisi DIPA-nya, tapi uangnya sudah ada di situ, tinggal di, di tadi dialokasikan dimana direvisi DIPA-nya, tapi uangnya 3T itu, sudah ada.

Kemudian ini diluar IJD, diluar yang 3T, Pak ya, itu nanti ada juga amal air minum, dan air limbah, Inpres-nya kan juga sudah ada 690, 600 berapa? 696 miliar yang baru disetujui oleh Menteri Keuangan. Itu untuk Inpres air minum dan air limbah, untuk memanfaatkan IPA-IPA yang sudah kita bangun.

Tentang yang mekanisme tadi Bu, Bu Neng, saya kira sudah mengerucut, Bapak. Bukan kami tidak percaya dengan komunikasi Bapak sekalian apa, telepon-telepon, tapi ini adalah *programming*, yang kami juga diperiksa oleh e-KPK. Jadi kalau memang bisa, komunikasi Bapak *situ* di paraf di, apa ya, dari fraksi, kemudian diketahui oleh Pimpinan, *jebret*, pasti *clear*, jadi akuntabel.

Tidak hanya, itu kan ISO, itu kan hanya apa, yang kita lakukan di, di apa, di-*record*. Jadi ini adalah kayak IJD, kami dituntun betul oleh Pak, KPK untuk *programming*-nya. Jadi ini adalah *programming* Bapak, bukan, mohon maaf, saya bukan enggak percaya pada komunikasi kita yang selama ini kita lakukan, tapi kami juga ditegur bahwa ini, apa dasarnya? *kok* milih *situ*? *kok* di sana? *kok* di sana? Kalau ada fraksi diketahui oleh Pimpinan, pasti sudah dilaksanakan. Jadi itu akuntabilitas dari *programming* Bapak, mohon maaf.

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Berarti *clear* ya, yang ini ya, semua *clear* ya, Pak Menteri sudah sampaikan, Untuk Dapil ya, Dapil ya, sudah *clear*.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**



Ya, dan tadi Pak Dewo, tidak melampaui kuota Anggota. Saya kira sudah *clear* kalau sudah begitu, tidak hanya apa, verbal saja. Kalau boleh itu disetujui, sangat akuntabel dalam *programming*.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Bapak, mau lanjutkan.

**F-PG (DRS.ALI MUFTHI, S.AG, M.SI.):**

Bentar-bentar Pimpinan.  
Ya, sedikit saja.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Silakan, Mas.

**F-PG (DRS.ALI MUFTHI, S.AG, M.SI.):**

Mohon maaf Pak Menteri, IJD yang sudah kontrak itu, gimana?

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

IJD belum kontrak untuk 2024, karena uangnya baru.

**F-PG (DRS.ALI MUFTHI, S.AG, M.SI.):**

Yang saya tahu di Jawa Timur itu, sudah beredar.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Bukan baru....

**F-PG (DRS.ALI MUFTHI, S.AG, M.SI.):**

Sudah, sudah ada pemenangnya, Pak.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Belum, belum, saya yakinkan belum karena DIPA-nya belum ada, itu baru.

**F-PG (DRS.ALI MUFTHI, S.AG, M.SI.):**

*Lah* kan sudah beredar Pak Menteri, sebentar, sebentar ya, saya cari data itu.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Sebentar, sebentar.

**F-PG (DRS.ALI MUFTHI, S.AG, M.SI.):**

Ya, ya, ya makasih Menteri

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Karena kita ingin paralel, nanti begitu DIPA-nya jadi, jalan.

**F-PG (DRS.ALI MUFTHI, S.AG, M.SI.):**

Boleh, boleh Pak Sekjen, nanti di *crosscheck* di balai ya.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Jadi itu kayak tender dini. Kalau kita tender dini, Oktober ini kan sudah ada, November kan sudah ada tender, penetapannya menunggu DIPA.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Biar, biar jelas apa namanya, arahnya.

**F-PG (DRS. HAMKA B. KADY, M.S.):**

Ini masih interupsi atau gimana ini, Pak Ketua?

**ANGGOTA KOMISI V DPR RI:**

Pertanyaan saja, Ketua.

**F-PG (DRS. HAMKA B. KADY, M.S.):**

Saya lebih interupsi tadi daripada ini, kalau memang interupsi, ya interupsi.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Satu-satu Pak, matikan dulu *mic*-nya Pak, masih? mau interupsi sekarang Pak Hamka? sudah? sudah Ya.

Jadi, jadi Pak Menteri silakan dilanjutkan, Pak.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Oke, terima kasih, mohon maaf Pak, ini saya jadi semangat juga ini, terima kasih.

Bapak Pimpinan, Ibu-Bapak Anggota DPR RI Komisi V yang terhormat dan kami hormati, dan kami sayangi, kami muliakan Bapak,

Menindaklanjuti laporan kami sebelumnya pada Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Kementerian PUPR pada tanggal 6 Juni 2024, yang salah satu pembahasannya mengenai Evaluasi Pelaksanaan APBN 2024 sampai bulan Mei 2024, maka dapat kami melaporkan progres pelaksanaan APBN 2024 sampai bulan Agustus sebagai berikut:

1. Pagu awal Kementerian PUPR tahun 2024 sebesar Rp147,37 triliun, mengalami penambahan sebesar 15,72 triliun, sehingga pagu menjadi Rp163,09 triliun dengan rincian:

1) Luncuran SBSN 2023 sebesar 1,38 triliun untuk antara lain untuk perkuatan tebing Sungai Tabalong, pengaman Pantai Manggar, serta pembangunan jalan dan jembatan;

2) Tambahan itu dari, dari percepatan pinjaman hutang luar negeri sebesar Rp6,50 triliun antara lain untuk *Export Bank Korea emergency assistant for rehabilitation and reconstruction* di Sulawesi Tengah, *Indonesia tourism development project* dan *national urban water supply project*.

3) Tambahan Rupiah murni dari BABUN pengelolaan belanja lainnya BA 999.08 sebesar 7,84 triliun. Untuk pembangunan IKN sebesar 6,4 triliun, Daerah Otonomi Baru Papua sebesar 780 miliar, serta penuntasan program prioritas lainnya antara lain rehabilitasi dan renovasi *venue* PON di Aceh, renovasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, dan rehabilitasi Wisma Atlet Kemayoran sebesar 660 miliar.

Realisasi anggaran per tahun pada tanggal 20 Agustus 2024 sebesar 68,05 triliun atau 41,7% dari total anggaran, dengan progress fisik sebesar

49,3%. Progres keuangan ini lebih tinggi 9,2% dari realisasi tahun anggaran 2023 yang sebesar 32,5%.

Progres Lelang hingga 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Paket terkontrak sebanyak 2.708 paket, dengan pagu DIPA 109 triliun, atau 96% dari total kegiatan konstruksi sebesar 113,94 triliun meliputi paket tender seleksi baru, baik yang *single years*, maupun yang *multi years* baru sebanyak 1.370 paket dengan pagu DIPA 16,49 triliun, dan melanjutkan paket 5 tahun, lintas tahun yang telah terkontrak pada tahun anggaran sebelumnya, atau yang namanya *multi years* kontrak lanjutan sebanyak 1.338 paket dengan pagu DIPA 92,86 triliun, dan paket dalam proses lelang, 461 paket dengan pagu 4,59 triliun.

Ini adalah paket yang sedang menunggu untuk proses penandatanganan kontrak. Jadi semuanya sudah dalam proses lelang, dan kalau yang ini sudah ada pemenangnya, tinggal menunggu proses penandatanganan kontraknya.

Selanjutnya, dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar 41,41 triliun. Progres pelaksanaan paket fisik IKN pada 20 Agustus 2024 sebanyak 108 paket adalah 50,4% dengan rincian progres *batch* pertama yaitu pada tahun sebelumnya sebanyak 40 paket, 91,4%.

*Batch* kedua sebanyak 31 paket 56,3%, dan *batch* ketiga sebanyak 30 paket, 14% yang digunakan untuk kegiatan sebagai berikut, infrastruktur sumber daya air sebesar 1,54 triliun antara lain: untuk pengendalian banjir DAS Sanggai di 1A KIPP dengan progres selesai 100%. Embung di KIPP progres 100%, sebanyak 22 embung. Kemudian penanganan banjir Sungai Sepaku IKN progress, 51%. ini agak terlambat karena pembebasan lahan yang baru saja disepakati oleh masyarakat pada bulan lalu.

Kemudian yang kedua, infrastruktur jalan dan Jembatan Sepan, inilah salah satu embung kita yang di sana, di KIPP 1A. Kemudian infrastruktur jalan dan jembatan, 18,91%, *eh* triliun antara untuk jalan tol IKN 3A dengan progress 83%, tol IKN 3B progres 96%, dan tol IKN 5A progres 91%.

Duplikasi jembatan Pulau Balang, bentang pendek saat ini sudah 100%, dan jalan *feeder* distrik di kawasan IKN, progresnya 84%, yang ketiga infrastruktur di IKN, untuk infrastruktur pemukiman sebesar 12,91 triliun, antaranya untuk penataan Sumbu Kebangsaan tahap pertama, progresnya sudah 100%.

Kemudian Gedung Istana Negara dan lapangan upacara progres 93%, yang kemarin dipakai untuk Upacara 17-an. Kemudian Gedung Istana Garuda, itu adalah kantor Presiden yang di belakangnya, progresnya 93%. Instalasi pengolahan air minum, progresnya 92%, sekarang sedang terus digelontorkan untuk meningkatkan kapasitas air minumnya, kualitas maksud kami.

Kemudian jaringan perpipaan transmisi SPAM Sepaku paket 2, progres 99%. Jadi dari IPA ke reservoir induk, panjangnya 15 kilometer dari dari reservoir induk ke persil-persil di IKN, panjangnya sekitar 22 kilometer, progresnya adalah 92%. Kemudian jaringan, ini adalah jalan jaringan transmisi dari IPA ke reservoir, jaringan distribusi utama dan jaringan distribusi pembagi tahap 1 progresnya 97%, dan Kantor Kementerian Koordinator 4, progres 92%.

Infrastruktur perumahan, rumah tapak jabatan menteri sebanyak 34 rumah, progresnya hampir 100%. Kemudian hunian Polri dan BIN 82%, hunian ASN 4 progres 80%, dan hunian Paspampres progress 63%. Dari 47 hunian perumahan ini, jadi rumah susun ini, pada saat ini akan selesai 12 Rusun. Nanti bertahap bulan September, Oktober, November, dan selesai 100% pada akhir tahun ini. Tadi yang padat karya, sudah kita bahas.

Kemudian, untuk percepatan pelaksanaan tahun anggaran 2024 seperti biasanya, itu mempercepat proses pengadaan....

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Interupsi, Ketua.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Iya, silakan, silakan.

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Ya, Pak Saudara Menteri, saya kira apa yang disampaikan Saudara Pak Menteri ini, kita semua sudah dapat, kita susah ketemu Pak Menteri ini, kemarin sibuk di IKN, sampai kita tahu bagaimana sibuknya Pak Menteri, kan sudah selesai. Kita semua sudah tahu itu sudah selesai. Apa yang Bapak laporkan ini, kita terima semuanya.

Jadi kita sudah terima ininya. Lebih bagus kita saat ini, kita pergunakan untuk masalah-masalah yang masih ada yang perlu kami sampaikan ke Pak Menteri. Jadi saya kira ini yang kita, kita selesaikan aja ya, supaya teman-teman kita fokus waktunya ini. Hari ini kita bisa selesaikan semua masalah-masalah, kendala di Dapil-Dapil dan lain-lain. Kita tadi masalah padat karya sudah tinggal selesai. Jadi saya kira itu Pak Menteri,

Terima kasih.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Oke, terima kasih Bapak atas arahannya.

Saya kira saya yang kedua adalah tentang laporan, saya kira juga laporan, Bapak-Bapak juga sudah membaca. Sekarang saya menunggu arahan dari Komisi V.

Terima kasih.

**(PERGANTIAN KETUA RAPAT)**

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Makasih, maaf ini Pak Andi Aras lagi tidak bisa terwakilkan.

Jadi, mungkin kita masuk saja pada teman-teman yang berkehendak bicara menyampaikan informasi Dapil-nya, atau dimananya, atau masalah-masalah daerah negara kita yang kita bicarakan di sini.

Oleh karena itu, yang sudah menyampaikan nama-nama di depan ini tercatat, yang pertama Pak Bakri ini, silakan Pak Bakri, tapi dia yang pertama iya.

Silakan Pak, pendek-pendek ya Pak Bakri ya.

**F-PAN (H.A. BAKRI HM., S.E.):**

Karena baru, rajin Pak, iya anak baru, rajin.  
Baik, makasih.

Pimpinan yang saya hormati,  
Pak Menteri beserta seluruh jajarannya yang saya banggakan,  
Seluruh Anggota Komisi V yang saya cintai,

Makasih banyak, Pak, atas kesempatan diberitahu, disampaikan kepada saya.

Pertama-tama, saya tentu mewakili masyarakat Provinsi Jambi menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kementerian PUPR yang sudah berjuang. *Alhamdulillah* hari ini sudah mulai kelihatan, Pak, tanda-tanda kehidupan jalan tol di provinsi Jambi, yang dulu saya selalu dikritik, Pak. Konon dulu pernah saya ke Palembang hadir meninjau jalan tol sampai diprotes, ini kenapa Jambi *kok* hadir di sini, sementara jalan tolnya tidak hadir, tidak ada. *Nah, alhamdulillah* hari ini sudah bisa dirasakan tolnya, itu yang pertama.

Terus yang kedua, tadi teman-teman bicara tentang program Dapil. Saya hampir 1 tahun setengah, Pak Menteri, ditugaskan oleh fraksi di Komisi I, jadi putus komunikasi, Pak. *Nah*, mohon izin nanti saya mungkin akan berkomunikasi dengan beberapa Dirjen terkait dengan program-program yang kemarin terputus, Pak, karena kata orang itu janji itu adalah utang, Pak. Jadi saya masih punya utang ini 1 tahun setengah itu, saya belum terbayar utang saya, Pak, sama masyarakat Provinsi Jambi.

Terakhir, izin juga mungkin Pak, Pak Menteri, mungkin dalam minggu ini, saya juga mohon bantuan nanti akan berkunjung ke tol sesi 3, dan sesi 4, *alhamdulillah*, berjalan dengan baik. Mudah-mudahan diperkenankan nanti.

Itu aja mungkin, Pimpinan, singkat.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Cocok, orang baru, jadi harus memberi contoh yang cepat.

*Nah*, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kita punya acara agenda hari ini kan dua, yang pertama realisasi tahun anggaran 2024 sampai Agustus, yang kedua adalah persoalan LKPP tahun 2023. Sementara, untuk anggaran tahun 2025, itu nanti minggu depan kalau tidak salah ya.

*Nah*, mungkin dua hal ini saja dulu yang kita sampaikan, iya jangan masuk ke sana dulu supaya kita singkat-singkat waktu ini, *udah* mau malam ini, baru Golkar dan Munas lagi kita ini di sana, masih penutupan Munas.

**F-PAN (H.A. BAKRI HM., S.E.):**

Iya, Pak Ketua, karena orang baru Pak Ketua, jadi mohon maaf kalau sekarang, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Iya, jadi dua hari saya dibicarakan.

Berikutnya, Pak apa? Ibu Neng, Neng Eem, silakan, masih bicara lagi atau cukup? Ya, yang lain, baik. Berikutnya Pak Sigit, sudah cukup? sudah.

Kemudian berikutnya, oh silakan, silakan.

**F-PKS (IR. H. SIGIT SOSIANTOMO):**

Nanyain IKN, Pak, sudah? *ndak* dikit saja, enggak usah? Enggak usah, iya, oke, saya, saya di-*delete* sama, Pak Ketua.

h

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Ya, Pak Sigit itu paling taat kepada Pak Roberth, dia.

Kemudian berikutnya Pak Irwan masih ada?  
Silakan Pak Irwan.

**F-PD (DR. H. IRWAN, S.IP., M.P.):**

Kalau saya agak lama karena tinggal berapa bulan lagi.

**KETUA RAPAT (IR. RIDWAN BAE/ WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-PG):**

Silakan, silakan Pak, silakan.

**F-PD (DR. H. IRWAN, S.IP., M.P.):**

Yang saya hormati Pimpinan Komisi V beserta rekan-rekan Anggota Komisi V yang saya banggakan,  
Pak Menteri PUPR,  
Pak Sekjen,  
Pak Irjen,  
Pak Dirjen,  
Pak Direktur, dan  
Seluruh jajaran Kementerian PUPR yang saya banggakan,

Tentu kalau bicara padat karya, tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Menteri, dan harapan saya mungkin tidak banyak rapat nanti bersama Pak Menteri dan jajaran. Saya titip agar usulan kami terkait yang padat karya 2024 ini bisa direalisasikan. Dan tentu mewakili masyarakat Kaltim, kami menyampaikan terima kasih kalau itu diwujudkan, termasuk usulan kami terhadap usulan fraksi di beberapa provinsi, itu juga bisa di, diapa namanya, direalisasikan, karena itu adalah usulan di Dapil-Dapil Pimpinan fraksi kami maupun beberapa rekan-rekan di provinsi lain.

Kedua, yang terpenting sebenarnya kesempatan ini saya tunggu-tunggu karena kemarin di IKN merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun saya hadir, tapi enggak sempat ketemu Pak Menteri, tetapi saya 3 hari di sana, dan melihat begitu luar biasanya perayaan itu sehingga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Menteri. Mungkin tidak banyak ya yang bisa menyampaikan hal ini, tapi ini harus disampaikan karena ini bukan kerja yang ringan menurut saya, dan mewakili masyarakat Kaltim, tentu ini kami menyampaikan rasa bangga, rasa terima kasih kami kepada Pak Menteri, Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak Dirjen, dan Pak Direktur, serta kepala balai, yang saya melihat sendiri ya, tiap hari bekerja sehingga kemudian bisa menghadirkan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang membanggakan kita semua, dan saya hadir di sana melihat dari seluruh negeri hadir di sana, dan itu kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia sehingga, tentu sekali lagi saya sampaikan terima kasih Pak Basuki.



Saya terharu, Pak, cuma saya cari-cari, ya enggak ketemu ya, tapi saya lihat di televisi, saya cukup terharu, karena kunjungan pertama saya dulu sama Pak Menteri, Pak Danis, waktu masih Dirjen Cipta Karya, masih hutan. Satu mobil sama Pak Basuki, sempat terperosok mau masuk jurang, dan sekarang *udah* sangat bagus, tetapi di tengah bagusnya itu sebenarnya timbul kekhawatiran saya. Kita bisa merayakan mungkin, tetapi apakah kemudian yang kita bangun ini, kita bisa selesaikan dalam beberapa tahun ke depan.

Apalagi, saya lihat untuk 2025, anggarannya sangat sedikit ya masih 150-an miliar, mudah-mudahan ini sebagai Pak Menteri, maupun sebagai kepala otorita, bisa kemudian memperjuangkan hal ini karena kita ingin bangunan-bangunan yang ada sekarang Kemenko, kemudian fasilitas air bersih ya, embung, jalan dan lainnya itu bisa tuntas, tetapi juga bisa berkelanjutan. Sekali lagi Pimpinan, melalui Pimpinan, saya mengucapkan terima kasih.

Saya enggak tahu beberapa rapat-rapat berikutnya membahas apa, apa ini kemudian bisa bertemu, tetapi menurut saya sebagai Anggota Komisi V DPR RI, ikut bangga kita menghadirkan Ibu Kota Nusantara yang menjadi kebanggaan kita, karena itu adalah hasil pemikiran 100% anak bangsa.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pimpinan.

Terima kasih banyak.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(PERGANTIAN KETUA RAPAT)**

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Terima kasih, Pak Irwan.

**F-PKS (IR. H. SIGIT SOSIANTOMO):**

Interupsi, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Iya, silakan.

**F-PKS (IR. H. SIGIT SOSIANTOMO):**

Ada satu yang belum saya sampaikan, minta waktu.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Boleh Pak, silakan Pak.

**F-PKS (IR. H. SIGIT SOSIANTOMO):**

Pak Menteri, kunjungan kami ke, ini hasil kunjungan kami ya, kunjungan kerja Komisi V ke Istana Negara di Bali, namanya, istana apa itu? Tampaksiring. Pak Menteri, Istana Tampaksiring itu dibangun, direnovasi, dengan biaya sekian puluh juta ya, *eh* sekian puluh miliar. Pelaksanaanya, pemenangnya adalah dari Jakarta. Sementara, kompetitor-kompetitornya ada yang dari Bali. Hal ini menjadi pemikiran kami, bahwa Kementerian PUPR perlu menumbuhkan kontraktor-kontraktor nasional di daerah.

Bayangkan, perbedaan antara pemenang dengan kontraktor lokal, itu cuma 5 juta dalam lelang. Menurut saya ini tidak *fair* atau bahkan mungkin ada permainan. Maaf, saya agak-agak menuduh ini walaupun, mungkin bukan istilahnya menuduh, begitu ya, bagaimana, tetapi gara-gara aturan kita yang memenangkan paling murah ya, walaupun hanya selisih 5 juta, itu menang yang selisih 5 juta. Padahal dia kontraktor Jakarta, yang selisih 5 juta itu lebih.

**F-NASDEM (DRS. H. TAMANURI, M.M.):**

Pimpinan, interupsi, ini diberi kesempatan semua anak buahnya.  
*Nih*, jangan yang satu, sudah 3 kali, satu 4 kali, yang lain belum sampai.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Siap, siap, tadi saya pikir interupsinya menyangkut masalah yang lain Pak, masalah yang kita bahas sekarang kalau nanti itu boleh Pak Sigit simpan buat jatah Pak Sigit nanti.

**F-PKS (IR. H. SIGIT SOSIANTOMO):**

Kalau begitu saya singkat, Pak Menteri perlu aturan.

Saya minta kebijakan dari Pak Menteri untuk memenangkan kontraktor lokal, walaupun dia hanya kalah, ya nilai angkanya enggak seberapa, kira-kira begitulah kira-kira.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Oke, itu bukan interupsi istilahnya itu.

Silakan Pak Hamka, setelah Pak Hamka, Pak Boyman.

**F-PG (DRS. HAMKA B. KADY, M.S.):**

Makasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,  
Pak Menteri,  
Pak Sekjen,  
Pak Dirjen dan seluruh jajaran yang saya hormati,

Izinkan saya tentu menyampaikan terima kasih dan apresiasi dari seluruh kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR yang lebih khusus, yang lebih dikenal sekarang IKN, luar biasa, tapi namun demikian, beberapa catatan Pak Menteri, itu sudah berhasil, tetapi ada ketimpangan yang terjadi terhadap program-program yang kecil, seperti yang kita persoalkan tadi mengenai padat karya dan sebagainya.

Saya hanya ingin meng-*appeal* kepada kita semua, khusus kepada Kementerian PUPR, bahwa ayo di samping yang besar-besar, kita bangga, kita juga harus memikirkan yang kecil, harus ada solusi yang terbaik. Saya ambil contoh pada seluruh Eselon I, II harus kita bangun komunikasi dengan baik untuk kepentingan masyarakat kecil.

Saya ambil contoh satu, Pak Menteri. Usulan misalnya *nih*, ada dua rumah susun, pondok pesantren, yang saya usul 2024, tidak ada kabar, tidak ada berita, tahu-tahunya tidak jadi. Hanya, info saya dengar bahwa dialokasikan 2025. Ada apa *sih* manajemen di Eselon I, ini *kok* tidak ada komunikasi. P3-TGAI keluar SK-nya, bukan yang punya kita, tapi punya orang lain. Ini tolong dikomunikasikan terbukalah, itu *loh*. ada fakta yang saya terima, *gitu*, sehingga di bawah itu simpang siur, yang mana pengusulnya.

Sekarang kami sadar dan kami pun semuanya pasti sadar, bahwa kita harus ikuti aturan sesuai dengan ketentuan, ada aplikasi dan sebagainya, dan sebagainya. Ternyata yang keluar juga bukan milik kita yang diusulkan, itu *loh*. Padahal kita sepakat bahwa yang diprioritaskan yang utama dulu selesai adalah Anggota. Ini yang saya ingatkan ke Pak Menteri dan seluruh jajaran. Ayo kita bangun komunikasi dengan baik. Kami tidak minta muluk-muluk, Pak.

Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara, keuangan negara itu digunakan oleh pemerintah negara. Pemerintah negara di sini adalah Presiden, Anggota DPR, dan Yudikatif lainnya, itu penggunaan keuangan negara, bukan hanya Presiden saja. Ini saya mohon, kita lakukan sesuai dengan aturan semuanya, sebab kalau tidak, semua kita saling menuduh, saling apa namanya ya, tidak percaya antara satu dengan yang lain.

Saya senang sekali Pak Menteri tadi sudah terbuka. Ayo kita terbuka, kalau misalnya padat karya tidak bisa lagi ditambah dengan potensi 3 triliun, ya sudah, kita bicarakan apa yang harus kita lakukan. Apakah kita harus minta maaf kepada rakyat, ya itu konsekuensi, Pak. Itulah menurut saya perencanaan awal itu harus jelas. Kita tidak boleh menitipkan bahwa sisa anggaran yang harus kita andalkan padahal kita sudah menjanjikan itu *loh*, Pak.

Ini pengalaman menurut saya. Mari kita saling bahu-membahu membangun negara ini, bukan hanya Presiden, bukan hanya kementerian, tetapi tentu operasionalnya kementerian. Seakan-akan kami ini tidak ada apa-apanya. Untuk apa *sih* bicara DPR menyulitkan saja. Ini mungkin bayangan saya saja seperti itu, mungkin pribadi saya seperti itu. Susah saya berkomunikasi. Nanti ada laporan, tahu-tahunya, oh *ndak*, enggak dianggarkan lagi perumahan, nanti tahun 2025.

Ada dua yang saya usulkan Pak Menteri, satu di daerah Jeneponto, yang paling miskin di Kabupaten Jeneponto sana. Itu tidak ada berita. Padahal di kota itu, Pak Menteri, di kabupaten itu, pesantren yang mungkin hanya membutuhkan bangunan yang kecil 4 miliar saja, tidak ada berita, tidak ada apa-apa, langsung saya nanya-nanya di bawah, dia bilang, untuk yang besar ini tidak ada anggarannya, nanti dianggarkan tahun 2025. Tidak begitu cara penjelasannya, termasuk P3-TGAI.

Apa yang ingin saya sampaikan ini, ayo mari kita saling percaya bahwa, kami pun melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan penuh dengan aturan-aturan yang ada. Kami tidak mau main-main. Saya berharap Pak Menteri bahwa, kalau memang sampai 1 koma, 1 triliun tambahan saja, iya sudah kita bicara, kenapa *sih* bisa seperti itu. Sama saya sampaikan, Pak, Pak Menteri, DPR juga mengalami hal yang sama. Kunjungan kerja semua dipotong, satu kali saya bicara Banggar, baru keluar uangnya. Ini, ini, ini harus kita terbuka semuanya, Pak, apa *sih* masalah yang sebenarnya. Ini jujur saya sampaikan, DPR pun mengalami kesulitan anggaran atau kesulitan pencairan anggaran, dan saya yakin, dan percaya kementerian pun seperti itu, tapi harus kita terbuka, harus kita sampaikan dengan baik, komunikasi dengan baik, kalau masih bisa kita berkomunikasi ya.

Saya kira Pak Menteri, terima kasih semuanya ya, apa yang sudah kita patrihkan, ya tentu kita masa jabatan berakhir pada tanggal 31, 30 September selesai dan akan dilantik lagi bagi yang lanjut 1 Oktober, mari kita menyelesaikan dengan baik. Syukur-syukur kalau masih saya, *alhamdulillah* saya berterima kasih, masih lanjut. Syukur-syukur kalau masih lanjut di Komisi V. Kalau tidak, janji itu harus saya selesaikan, baru saya pindah. Kalau ya, kalau pindah, tapi mudah-mudahan tidak pindah Pak Menteri ya.

Saya kira itu saja catatan saya. Lebih bagus kita simpulkan saja ya, kesimpulan apa ya, bukan, maksud saya kesimpulan daripada apa yang kita harapkan bahwa sama dengan tahun lalu, Pak Menteri sudah menjanjikan lagi, bahwa potensi 3 koma sekian triliun, Pak Menteri, kalau memang potensi itu tidak memungkinkan, kita tidak usah bicarakan. Lebih bagus kita *blak-blakan aja*, apa boleh buat, kita mau ngapain ayo, tetapi tentu kami berharap dapat seperti itu. Potensinya itu, yang *real* kira-kira seperti apa, baru kita duduk bersama, rumah yang bisa ditambah, pesantren, pondok pesantren yang bisa dibangun gedungnya, itu yang harus kita duduk secara baik.

Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya karena kita semua berada pada posisi yang sama, Pak Menteri, memikirkan semua sampai yang sekecil-kecilnya.

Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Makasih Pak Hamka, sekedar informasi, ada tambahan dua komisi nanti Komisi XIII, mudah-mudahan Bapak tetap di Komisi V.

Silakan, Pak Boy.

**F-PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Bapak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati,

Sebenarnya, semua apa yang ingin kami sampaikan di Komisi V ini, saya pikir sudah terwakili secara halus, agak sedikit keras, bahkan keras, saya pikir tujuannya sama, *cuman* dengan keterlambatan apa yang sudah kita sepakati ini, barangkali ini curhat kami saja kepada Pak Menteri karena situasi di lapangan tentu beda, terutama berkaitan dengan masalah padat karya ini.

Beberapa waktu yang lalu, saya pernah langsung kirim video ke Bapak Dirjen Bina Marga, Pak Arief ya, Pak Arief ya, ada beberapa video saya kirimkan ke Pak Arief. Saya mau kirimkan sebenarnya kepada Pak Menteri, *cuman* Pak Menteri kan masih pakai HP jadul, jadi enggak bisa ngirim video. Jadi, gara-gara janji Inpres yang di Kabupaten Ketapang, Kecamatan Kendawangan itu, Pak Menteri, tahap pertama dari Kendawangan ke Sungai Tengar sudah selesai, selanjutnya dari Sungai Tengar, ke Kecamatan Pesaguan belum selesai.

Masyarakat, Pak, sangat viral, gara-gara jalannya sangat hancur dan jelek sekali. Secara kebetulan, ada orang yang ingin melahirkan, gara-gara jalannya itu jelek, tidak sampai ke rumah sakit, melahirkan di jalan. Itu video pertama, *alhamdulillah* lahir dengan selamat. Video kedua, Pak Menteri, ada anak kecil sakit, bawa juga ke rumah sakit, gara-gara melewati jalan tersebut, yang sangat jelek kondisi jalannya, akhirnya meninggal di jalan itu. Makanya, videonya saya kirim ke Bapak Dirjen Bina Marga, bahwa janji-janji kita terhadap Jalan Inpres ini, bahkan Kabalai barangkali juga pada posisi yang sangat sulit untuk menjelaskan dari bulan, mulai bulan 7, bahkan Agustus, *Insyah Allah*, ini barang ini sudah dilaksanakan lagi pekerjaannya begini dan begitu, tetapi *alhamdulillah* sampai sekarang belum dilaksanakan kembali jalan tersebut.

Untuk itu Pak Menteri, saya berharap mudah-mudahan potensi 3 triliun itu jangan diturunkan lagi, jadi 1 triliun, Pak Hamka, tetap saja 3, bahkan kalau bisa lebih. Itu harapan kami, Pak, agar janji-janji kami, kesepakatan kita Bersama, Pak Menteri, dalam rangka untuk memenuhi berkaitan dengan masalah padat karya ini bisa direalisasikan, dan masyarakat menerima hasil dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Saya harap Pak Menteri sekali lagi, apa yang disampaikan Pak Hamka itu betul. Saya juga pernah menanyakan berkaitan dengan masalah pembangunan Rusun Pesantren, langsung saja dijawab katanya uangnya sudah enggak ada, tanpa ada alasan apapun. Padahal, kesepakatan dengan Pak Menteri-nya, itu duitnya sudah *standby* ada, tetapi kenapa jawabannya, menurut saya sangat tidak logis, karena usulan itu sudah masuk, bahkan dari pihak kementerian pun sudah survey, Pak, sudah survei, tiba-tiba dengan gampang menyatakan duitnya tidak ada sehingga usulan tersebut dibatalkan untuk dilanjutkan di 2025.

Saya pikir tidak boleh seperti itu, Pak Menteri, karena menurut kita, menurut kita ini ya sesama orang beragama, janji itu adalah utang, Pak, janji itu adalah utang, janji kami kepada masyarakat juga, itu merupakan janji yang harus kami laksanakan. Untuk itu, dalam kesempatan ini, tolong, Pak, tolong, apa yang sudah kita sepakati dan sudah kita janjikan, tolong dilaksanakan agar kita sama-sama bebas dari segala janji dan kita menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat buat orang banyak.

Saya pikir demikian, Ketua.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Pak Tamanuri, Pak.

**F- NASDEM (DRS. H. TAMANURI, M.M.):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pak Pimpinan beserta seluruh Anggota,  
Pak Menteri, seluruh jajarannya,  
hadirin bahagia,

Tadinya saya tidak mau ngomong ini, Pak, saya pikir sudah *ngonci*, tapi setelah Bapak keluarkan 3 triliun, wah buka lagi hati saya. Saya harus ngomong, *nih*.

h

Pak Menteri, begitu keluar kesepakatan kita, jadi saya langsung bikin BPS ini sesuai dengan yang yang lama, 2.000, 2.000 buah. *Nah*, sekarang ini baru keluar 700 rumah. Ada sebagian orang-orang itu, begitu kita kasih tahu bahwa dia mendapatkan rumah, rumah yang lama, yang gedek segala macam itu, dirobohkan, dia langsung pindah ke tetangganya, keluarganya. *Nah*, ini kasihan, Pak, kalau ini lama kasihan, Pak. Oleh karena itu, mungkin, mungkin kalau ada dana kita ini, agak diprioritaskanlah untuk BPS ini, sehingga amal ibadah Bapak itu ya sampai di akhirat, Pak, jangan hanya justru menimbulkan dosa.

Kemudian Bapak, Bapak-Bapak Dirjen, mohon maaf Pak Menteri langsung ke Dirjen ini, kalau ada telepon, kalau ada usulan, perhatikan itu, karena yang paling tahu di bawah itu adalah saya. Kalau saya mau pindahkan ini, pindahkan ini, saya mohonkan kepada Pak Dirjen, Ibu Dirjen, tolong diperhatikan. Kalau Ibu-Bapak enggak tahu kondisi saya bawah itu. Ada yang *golokan*, dan segala macam, segala macam, *nah*, saya ngerti. Saya yang harus damaikan. Oleh karena itu, kalau ada usulan, perhatikanlah itu, supaya kalau bisa, jangan semua ini, *aduh*, sulit ini, ini harus diteken sama Pak Menteri. *Loh*, kalau semua Pak Menteri, enggak lanjut IKN itu, enggak usah juga ada ada pembantu-pembantu.

Kemudian perumahan, harga material. Harga material ini, Anggota Satker kita yang ada di Lampung itu, Pak Iwan, jadi turun ke bawah mencari harga-harga yang paling murah, ketemulah toko-toko yang *ecek-ecek*. Harganya murah dengan langganan *ngadu*, lalu padahal ini, ini material ini main utang-utang, Pak, si tuan rumah, yang punya rumah, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, mereka enggak ngerti itu, disangka mereka *cash*. *Nah*, oleh karena itu, tolong Pak Iwan, kasih tahu anak buah itu, jangan semau-maunya aja, ke mereka kan susah.

Saya rasa enggak banyak-banyaklah, segitu aja, jadi atas perhatian Pak Menteri, Pak Fatah yang sudah manggut-manggut, terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Untung cuman 3T, Pak, kalau 30T lebih panjang lagi kan, 10 kali lipat,

Silakan Pak Ali Mufthi, selanjutnya Pak Anim Falachudin.

**F-PG (DRS. ALI MUFTHI, S.AG., M.SI.):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pimpinan yang saya hormati,  
Seluruh Bapak-Ibu Anggota Komisi V,



Pak Menteri dan seluruh jajarannya,

Terima kasih atas waktunya, saya ini *ambekan* kalau Jawa ini, Pak Menteri, *ambekan gede*, merasakan pergulatan IBM antara Komisi V, dengan Kementerian PUPR. Ini kayaknya, kayak *opo*, *Tom and Jerry*, Pak Menteri ya, jadi saya *gudak-gudakan*. Padahal ini lembaga negara yang tentu relasinya harus saling menghormati. Ini lembaga yang proses untuk bisa duduk di sini ini ya, ya panas dinginlah, ya panas dingin, itu. Oleh karena itu Pak Menteri, kita butuh sebuah kejujuran aja sebenarnya. Sebenarnya apakah 2024 ini, kita seperti yang menjadi kesepakatan apa tidak, ini butuh kejujuran aja, apalagi, ini sudah mau *finish*, mudah-mudahan kita semua *husnul khatimah*. Kalau kita pada hari ini tidak jujur, itu jangan-jangan kita nanti diakhir pemerintahan akhir ini, kita tidak *husnul khatimah*, saya khawatir itu.

*Nah*, oleh karena itu, yang saya minta sebuah kejujuran, keikhlasan kita. Saya yakin, kalau kita sama-sama ikhlas itu Gusti Allah akan menyertai kita untuk saling, untuk memudahkan perjalanan ini. Saya malu juga, Pak Menteri, sampai kalau Anggota Komisi V WA Dirjen, *gitu* ya. Kita ini sebenarnya malu, malu itu bagian dari iman, tetapi demi masyarakat, itu kita lakukan. Apalagi WA Dirjen enggak dijawab, itu lebih malu, *gitu* kan, ya. Padahal, kita ini tidak punya kepentingan apapun kecuali hanya untuk kepentingan bagaimana agar masyarakat yang kita wakili, Dapil yang kita wakili itu bisa merasakan perjuangan kita, karena pemahaman masyarakat Anggota DPR itu fungsional, bermanfaat apa tidak bagi masyarakat itu, manakala mampu untuk menyuarkan aspirasinya di dalam kebijakan-kebijakan publik.

Hari ini saya punya *hope*, punya harapan, ekspektasi yang tinggi bahwa Pak Menteri adalah mampu untuk mengurai dari keruwetan ini, atau hari ini saya *hopeless*, harapan pesimis, apakah kita akan berakhir dengan *suul khatimah*. Seandainya *toh* tidak ada pun kurang, *gitu* ya, kalau ada kejujuran saya akan ikhlas saya pribadi, tapi mudah-mudahan yang lain juga begitu. Jujur aja Pak Ketua, Pak Anggota *gitu*, kalau sesuai 2023 ini, kayaknya uangnya enggak ada misal, itu akan lebih *fairness*, lebih *fairness*.

Di dalam Alquran itu, *faidza 'azamta fatawakkal 'alallah*, apabila ada kesepakatan di antara kalian, *tawakkal* kepada Allah, ini *gitu* ya, konsepnya begitu, kalau kita tidak ber-*tawakkal* kepada Allah, kita akan melibatkan setan dalam konteks ini. Saya pikir juga enggak, saya yakin tidak akan melibatkan itu.

Oleh karena itu Pak Menteri, ada persoalan yang sangat prinsip di dalam konteks kita beradministrasi di pemerintahan ini. Misal, DIPA belum ada, sudah ada lelang. Saya cek, katanya sudah ada izin Eselon I, *loh kok* enggak ada DIPA, *kok* boleh dilelang. Persepsi masyarakat kalau lelang ya ada uang. Eselon I yang ngasih izin itu gimana, ini harus dikasih penjelasan. IJD itu sudah beredar, *oh* di sana pemenangnya ini, di sana ini, *gitu*, tapi katanya *zonk*. Kalau kasarannya itu, apa, gironya itu gak ada isinya, kan ini *trouble*, Pak. Ini model, padahal kita sangat paham pemerintah apa, Kementerian PUPR itu kementerian besar, *resources*-nya itu luar biasa.



Saya pernah mendengarkan Badan Pengembangan SDM PUPR itu, Kementerian ini SDM-nya ada super jenius, ada super, super, super itu. *Nah*, mengkonstruksi sebuah program seperti ini, kenapa super jenius, super hebat itu, itu tidak mampu untuk mengendalikan. *Oh*, ini program bisa jalan, oh ini tidak bisa jalan itu. Kita terbiasa Pak, program ini bisa jalan, *oh* tidak, kita jujur, kita harus bisa begitu, mengestimasi, Pak. Namanya *planning* itu adalah mengestimasi berdasarkan potensi-potensi yang kita punya. Kenapa kalau tidak ada potensi, kita buat perencanaan? Ya, mohon maaf, Pak Menteri, ini pikiran sebagai seorang akademisi dalam konteks mengkonstruksi sebuah program yang saya nilai tidak efektif dengan ada lelang, dengan giro kosong, ada lelang, ada pemenang dengan DIPA kosong, ini sesuatu yang *hopeless*, sesuatu yang, yang memalukan, memalukan, Pak, kita.

Terus terang, misal saya itu ya, IBM berkurang, dengan kejujuran itu akan lebih, lebih, lebih punya harga diri. Punya *murū'ah* kehormatan daripada kita selalu *fujur*. *Fujur* itu bahasa Arab, yang artinya yang di depan, dan yang di belakang tidak sama, ya. Ini saya bicara dalam konteks tidak politik, tapi dalam konteks sebuah kedewasaan, kewarasan kita di dalam rangka mendesain sebuah sistem yang itu *accountable*, terencana, terukur, kan di dalam sebuah perencanaan ada SMART itu. Mungkin semua orang ada *sustainable*, *simple*, *measureable*, terukur, *spplicable*, bisa dilaksanakan, kan begitu, Pak. Untuk apa kita merencanakan enggak bisa kita laksanakan, terus kita buat palsu-palsu buat *fujur* tadi itu, sehingga giro kosong.

Oleh karena itu, Pimpinan, Pak Menteri, kita akan lebih terhormat di mata masyarakat kalau kita bicara apa adanya daripada Pak Menteri juga punya beban. Saya lihat secara psikologi itu kan ilmu jiwa itu bukan yang nampak, tetapi gejala-gejala perilaku itu mengindikasikan orang ini punya tingkat beban sekian persen, beban-beban yang luar biasa.

Saya pikir itu, Pak Menteri, mohon maaf bukan menggurui, tapi ini dalam rangka memberikan pencerahan bagi satu sistem yang sudah hebat seperti PUPR ini harus terjaga sampai kapanpun. Kehormatan sebagai *resource* bangsa ini, kalau sudah, kalau sudah PUPR ini tidak *accountable*, tidak akurat itu, maka kita sudah tidak punya kebanggaan lagi sebagai bagian dari bangsa ini karena kita tahu PUPR ini SDM-nya luar biasa, hebat-hebat, cepat, *terinjin*, tapi dalam konteks ini, mohon maaf dalam konteks IBM, terlalu kecil kita bicara IBM, terus kita menguras, meng..., ini..., ini semua dalam konteks IBM ini kita menjadi tercederai, tercederai, kurang lebihnya mohon maaf, akhir kata,

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Silakan Pak, Bapak Anim.

**F-PKB (H. ANIM FALACHUDIN MAHRUS):**

h

Saya?

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Pak Anim Falachudin.

**F-PKB (H. DEDI WAHDI, S. Pd):**

Siapa dulu Pak Kyai? saya dulu Kyai?  
Terimakasih, Pak Kyai.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pak Ketua bersama seluruh rekan-rekan Anggota,  
Pak Menteri bersama seluruh jajaran,

Singkat saja Pak, tadinya saya juga enggak mau bicara, tapi putar-putar bola, minggir, menengah lagi. Saya mau nanya, Pak Menteri, kalau semua program padat karya, dipenuhi sesuai kesepakatan, perlu anggaran berapa lagi Pak Menteri? apakah 3T yang disebut oleh Pak Menteri sudah cukup?

Yang kedua, kalau semuanya sudah dipenuhi karena itu sudah kesepakatan, kapan bisa realisasi Pak Menteri? Karena waktu Anggota sudah di ujung, waktunya maaf, waktunya Pak Menteri juga sudah diujung.

Yang ketiga, Pak Menteri, Program Inpres Jalan Daerah tahun ini, bisa realisasi apa tidak Pak Menteri? sudah cukup *gitu* aja, Ketua.

Terima kasih.

*Wallahul Muwaffiq ila aqwamit thariq,  
Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Singkat, padat, jelas, itu sudah benar tuh pertanyaannya.

Silakan, Pak.

**F-PKB (H. ANIM FALACHUDIN MAHRUS):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Siap-siap, Pak Aras

**F-PKB (H. ANIM FALACHUDIN MAHRUS):**

Terima kasih.

Ketua dan Anggota Komisi V, begitu juga  
Bapak Menteri,

Pertama, yang ingin kami pertanyakan, yaitu mohon penjelasan mengenai paket program tahun 2024 yang belum terkontrak yaitu sebanyak 461 paket dengan pagu DIPA 4,59 triliun. *Nah*, yang menjadi pertanyaan kami, apa kendalanya sehingga paket tersebut belum bisa terkontrak?

Yang kedua, Pak Menteri, kami apresiasi pelaksanaan Upacara 17 Agustus sukses di IKN. Namun, kami ingin mendapatkan penjelasan mengenai perbandingan pembangunan infrastruktur di IKN yang pembiayaannya berasal dari APBN, dan investasi swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Menurut kami pembiayaan pembangunan di IKN harus seimbang antara yang berasal dari APBN dan non APBN. Hal ini penting karena visi misi pembangunan pemerintah adalah pemerataan. Dengan demikian, APBN harus dialokasikan kepada seluruh Indonesia secara adil dan merata.

Kita tahu, Pak Menteri, bahwa Rusunawa di beberapa pesantren sangat dibutuhkan. Belum lagi, banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan, baik yang negeri, maupun yang swasta itu banyak sekali yang membutuhkan renovasi.

Saya kira itu saja, Pak Menteri, yang bisa kami sampaikan, dan kami mengapresiasi langkah-langkah yang dipersiapkan oleh Kementerian PUPR untuk mempercepat penyerapan anggaran tahun 2024.

Sekian, terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Terima kasih, Pak.

Pak Syahrul, silakan, Pak.  
Pak Aras-nya enggak ada *nih*.

**F-PKS (DR. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, LC., M.A.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi V, serta  
Pak Menteri dan jajarannya,

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Apresiasi tentunya pertama saya sampaikan kepada Kementerian PUPR dalam upaya melaksanakan tugas dalam hal pembangunan infrastruktur. Banyak capaian yang sudah dilakukan, meskipun masih ada hambatan dan tantangan. Apalagi ini Pak Basuki sudah diberi tugas yang berat untuk menyelesaikan IKN ya. Mudah-mudahan setiap langkah dan kerja Pak Basuki beserta jajaran menjadi amal saleh nantinya menjadi *sunah hasanah*.

Pak, ini masukan yang pertama, saya melihat dalam beberapa tahun terakhir *nih* Pak, ada rekanan yang bermasalah ketika dia bekerja menggunakan perusahaan lain, bukan perusahaan milik dia, bermasalah. *Eh* tahu-tahunya tahun depannya dapat lagi proyek di kementerian. *Nah*, ternyata kebijakan di kita itu *blacklist*-nya hanya *blacklist* perusahaan, orangnya tidak di-*blacklist* yang, yang di-*blacklist* hanya perusahaannya. Padahal, dia adalah pelaksana atas pekerjaan yang pernah bermasalah, Pak. Jadi, ini masukkan agar nanti tidak hanya *blacklist*-nya itu perusahaan, tetapi *blacklist*-nya juga adalah personal pelaksananya.

Jadi teman-teman di bawah harus tahu siapa *sih* kalau ini perusahaannya yang mengerjakan, siapa ini kan sudah menjadi rahasia umum kan, bahwasanya seseorang bisa saja memakai perusahaan temannya atau karibnya atau dia pinjam, atau segala macam, Pak, sehingga tidak terjadi, ini sudah pernah dapat pekerjaan, pekerjaannya tidak selesai, kemudian perusahaannya di-*blacklist*, *eh* tahun depannya atau 2 tahun yang akan datang dapat lagi dia pekerjaan, Pak, padahal teman-teman jadi korban, ya teman-teman jadi korban.

Kemudian yang kedua, Pak Menteri, saya sederhana saja. Mungkin kita kasih tahu, kasih waktu kepada Pak Menteri sebagaimana yang tadi sampaikan ada potensi 3 triliun untuk menampung apa yang tadi kita sampaikan. Mohon Pak Menteri, mungkin *timing*-nya kapan sehingga kami juga bisa memberikan kepastian. Ya, tentu punya beban moral bagi kami ketika tadinya dijanjikan sama angkanya dengan tahun kemarin, tentu juga data-datanya sudah kami kumpulkan. *Nah*, tetapi kalau ya yang namanya perencanaan kan, bisa terwujud. Allahu apa, *anta turid wa ana urid Allahu wallahu qodirun alam wallahu wallahu fa'alu lima yurid*, ya kita mau, kamu mau, tapi Allah-lah Yang Maha Tahu dan Maha Kuasa atas apa yang dia mau.

Pak Menteri, saya hanya menggaris bawahi, selain IBM ini kan ada yang memang juga kita komunikasikan dan kita janjikan seperti dia tidak termasuk IBM, tetapi termasuk memang bagian yang memang seperti tahun-tahun

sebelum sebelumnya tadi sudah disampaikan seperti Rusunawa yang kita janjikan sama kyai-kyai ini. *Nah*, kira-kira dari 3 triliun itu tertampung berapa? Hanya minta waktu, mungkin Pak Ketua, minta penegasan dari Pak Menteri, kira-kira memformulasikannya itu kapan kira-kiranya? *nah*, itu saja ya, artinya nanti ada tambahan BSPS-nya berapa, P3-TGAI-nya berapa, ini tentu kita minta berikan waktu kepada Pak Menteri.

Kemudian Pak Menteri, terima kasih atas kerja sama kita. Ini tahun, tentu pembahasan terakhir, cuma menjadi pertanyaan ini, ada kegalauan. Kawan-kawan yang saat ini di Komisi V, membahas APBN 2025, adanya di Komisi V, kalau tahu-tahu nanti di periode barunya tidak di Komisi V, ini Pak Menteri pertanyaannya, apa dapat, atau bagi dua *nih* dengan teman yang lain *gitu*? Nanti mohon penjelasan kebijakannya supaya kami, sekarang *nih*, kan, kami lagi ngumpulkan, sudah ada yang datang aspirasi kami tampung tahu-tahunya, *eh* pindah Komisi, enggak dapat *gitu*. Jadi mohon juga *nih*, kebijakannya ini ya.

Terima kasih, Pak Menteri.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Kebetulan saya ada aspirasi ingin disampaikan Pak Menteri, ada, maaf, boleh Ketua? iya.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Ini padahal sepakatnya membahas 2024, Pak, belum 2025. Kayaknya yang menyerahkan usulan ini ada tanda-tanda mau berpindah atau mau ke mana *gitu*, seperti nya.

Selanjutnya, kami persilakan ke..., Pak Sudewo jadi mau bupati, Pak, makanya BPS-nya penting buat dia. Pak Suryadi Jaya Purnama, silakan. Sudah ya? sudah cukup, tadi itu sudah kebanyakan interupsi tadi ya.

Ibu Cen silakan, Ibu bupati juga *ni,h* Pak, iya.

**F-PG (CEN SUI LAN):**

Terima kasih, Pimpinan

Pimpinan yang saya hormati,  
Pak Menteri dan semua Anggota dan seluruh jajaran yang hadir,

Pak Menteri, daripada semua orang komplain, saya ngucapin terima kasih aja, Pak Menteri, krematorium saya sudah mau selesai, tapi kurang anggaran 6 miliar, jadi di antara 3 triliun itu, Pak Menteri, tolong disisihkan. Pak Menteri, satu lagi mohon map-map yang tadi itu diabaikan saja, karena nanti itu untuk tahun 2025, ya.

Yang, yang kedua Pak Menteri, saya kan belum menyerahkan, cemburu saya. Pak Menteri, saya tidak minta program, karena kalau yang diberikan kepada teman-teman saya pasti kecipratan. Saya minta janji saya kepada masyarakat Tanjung Pinang. Di sana ada SMKN Negeri yang sudah roboh, hampir roboh, dan kemarin dari balai sudah menyusun anggaran 20 sekian miliar, ditarik balik.

Saya selalu ditelepon kepala sekolah dan sudah saya sampaikan ke Bu Dirjen, Bu Direktur juga, saya enggak tahu apakah itu bisa dilanjutkan. Mohon Pak Menteri, kasihanlah kepada mereka karena sangat perlu sekolah itu, tidak ada bantuan yang dari lain, mohon dipertimbangkan agar dapat dilaksanakan. Mungkin itu aja Pak Menteri dari saya, mohon dijadikan catatan, juga kalau yang untuk BWS di Kepri sendiri, saya perlu pengaman pantai.

Satu lagi Pak Menteri, saya minta bantu Rusun mahasiswa untuk Natuna, kali ini aja Pak Menteri bantu saya untuk masyarakat Natuna, ya Pak Menteri ya, Rusunawa. Mungkin itu aja Pak Menteri.

Terima kasih, terima kasih, semua.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Calon Bupati Natuna Pak, iya nanti, yang terakhir ya, Pak Sudewo. Silakan.

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Mudah-mudahan terakhir ini. Ini wajar saja kalau Bu Cen mengucapkan terima kasih berulang kali kepada Pak Menteri, karena hanya dari perhatian Pak Menteri, bisa dijadikan modal untuk jadi Bupati Natuna. Kalau enggak ada perhatian dari Pak Menteri, enggak mungkin dia berani maju Bupati Natuna. Ini sudah bisik-bisik sama saya, Pak, banyak investor yang akan masuk ke sana, enggak *kerasan* di sini sebenarnya, sudah ingin meninggalkan Komisi V

Pak Menteri, terima kasih, saya tolong, Pak, dibantu untuk realisasi jalan Tol Demak-Tuban, Pak. Kalau rapat di tahun yang lalu kan, Pak Menteri menjanjikan bahwa studi selesai di akhir tahun 2023, sekarang sudah lewat setengah tahun lebih, Pak. Kalau saya tanya BPJT, itu ada di Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, kalau di Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, ada di Bina Marga, jadi jawabannya enggak *nganu*, Pak, enggak sama, Pak. Jadi saya sendiri bingung. Kami sangat berharap itu terealisasi, ini adalah hadiah dari Pak Menteri.

Kami *sih* berharap supaya Pak Menteri berkelanjutan di Kementerian PUPR, Pak, sangat-sangat berharap itu *gitu, gitu*. Ya, tolong Pak sering komunikasi dengan Pak Andi Iwan Aras, Pak, karena Pak Andi Iwan Aras itu, tim kecil yang menyusun kabinet berikutnya, Pak. Saya nanti di posisi mana

saja, tetap bersama-sama Pak Andi Iwan Aras, Pak, mengawal pemerintahan ini Pak, *gitu*. Jadi dengan kawan-kawan Eselon I, Eselon II, tetap berbaik-baikah kepada kami itu. Jadi gitu, Pak Menteri, mohon jalan tol ini Pak, sangat diharapkan.

Kalau memang tidak ada peminat dari pihak ketiga untuk di untuk investasi, dukungan dari pemerintah Pak, mungkin sedikit dulu saja, tidak harus sampai Tuban, Demak-Pati atau Demak-Rembang, itu sudah sangat membantu, karena krusialnya lalu lintas itu ada di Demak-Pati, Demak-Rembang Pak, yang Rembang ke sana memang sudah agak lenggang, *gitu*. Jadi, paling tidak, ruas itu dulu menjadi tahap pertama untuk bisa ditangani. Mungkin biayanya tidak begitu besar, dibuat bertahap, yang penting ada realisasinya, ada progresnya begitu. Kalau berharap dari investasi mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama, saya berharap itu dukungan dari pemerintah.

Jadi itu aja, Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Terima kasih, Pak Bupati.

**ANGGOTA KOMISI V DPR RI:**

Interupsi, Pak Ketua, boleh....

**F-PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):**

Izin, izin, tadi sedikit giliran saya, tadinya mau menyerahkan berkas ke Pak Menteri, tapi sudah saya lakukan di Dapil, dan Beliau sudah jawab, mengingatkan saja, Institut Teknologi Lombo,k Pak Menteri.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Ternyata sudah mendahului, Pak ya, tadi yang terakhir masih ada Ibu Irene ternyata, Ibu Irene, silakan.

**F-PDI PERJUANGAN (IRENE YUSIANA ROBA PUTRI, S. SOS., MCOMN&MEDIAST.):**

Ya, terima kasih, Pimpinan.

Pak Menteri, saya hanya ingin menyampaikan apresiasi besar terhadap Pak Menteri dan seluruh jajaran PUPR, terkait program yang sudah berjalan melalui program aspirasi yang saya sampaikan dalam rapat kerja sebelumnya. Terima kasih, terutama untuk tindak lanjut terhadap usulan saya untuk pembangunan jembatan rangka baja Kali Butu, yang saat ini sedang dilakukan evaluasi DED-nya oleh BPJN Maluku Utara. Ini saya sangat mengapresiasi Pak, sehingga harapannya masyarakat Loloda, tidak lagi menjadi masyarakat yang terpinggirkan, tetapi mereka memiliki akses ke pulau utama berkat adanya jembatan ini. Saya terima kasih sekali Pak Menteri ini adalah hadiah untuk masyarakat Loloda, hadiah yang sangat nyata dan *real* dan harapan saya tentunya masih ada beberapa catatan yang terkait dengan program aspirasi terutama adalah ini Kementerian PUPR.

Saya pikir untuk yang di bawah-bawah ini masih saja masyarakat sering kali mengalami, kalau bahasa Jawa-nya *kecele*, *kecele* dalam artian beberapa program itu hadir, tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Itu terkait dengan BSPS yang apa namanya, masyarakat meminta spek, tetapi spek yang hadir itu tidak sama, juga beberapa program dari programnya Bu Dirjen ini, masih banyak sekali oknum-oknum di bawah, yang saya pikir kurang disiplin.

Jadi, pendisiplinan masyarakat, *eh* pendisiplinan teman-teman jajaran PUPR di bawah ini, perlu sekali, Pak. Apalagi di Maluku Utara itu rentan karena wilayah sering dalam tanda kutip *quote and quote* mereka memalak masyarakat yang menerima program dengan alasan itu karena perjalanan yang cukup jauh. Jadi saya pikir itu tidak bisa ditolerir, ini terutama Bu Dirjen tolong, itu pasukan di bawahnya, ditertibkan secara administrasi.

Terima kasih, Pak Menteri, sehat selalu untuk Pak Menteri dan seluruh jajaran PUPR, terima kasih.

Selamat sore.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Terima kasih Bu Irene.  
Yang terakhir Pak Harley, Harvey *sorry*, Pak Harvey.

**F-PDI PERJUANGAN (HARVEY B. MALAIHOLLO):**

Iya, terima kasih Pak, terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri beserta jajarannya, juga  
Teman-teman Anggota,



Selamat sore, saya sedikit saja. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Menteri dan jajarannya, khususnya Dirjen Perumahan, karena khususnya terkait rumah khusus. Meskipun, saya baru mendapat info bahwasanya dari Pak Dirjen Perumahan, itu baru akan terlaksana di tahun 2025, saya sudah menantikan dari tahun 2023, karena saya pikir saya akan masih menjabat pada saat hal tersebut realisasi, tetapi saya masih cukup puas dan mudah-mudahan Pak Menteri di tahun 2025, dimana saya mungkin sudah tidak menjabat lagi, saudara-saudara saya di Suku Moi di Sorong khususnya, masih boleh menerima berkat dari Tuhan lewat Pak Menteri untuk menikmati Perumahan dari Suku Moi di Kota Sorong.

Terima kasih banyak sekali lagi, Pak Menteri, sehat-sehat.  
Terima kasih, dan Selamat sore, makasih Pak Pimpinan.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Terima kasih, Bang Harvey.

Selanjutnya ke meja Pimpinan, Pak, boleh silakan.  
Silakan.

**F-PDI PERJUANGAN (MOCHAMAD HERVIANO):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan Komisi V beserta Anggota,  
Pak Menteri Basuki beserta seluruh jajaran,

Izin, karena tadi yang PDI, Bu Iren dan Pak Harvey bicara, jadi saya juga harus izin bicara, enggak enak.

Pertama-tama, kami singkat karena sudah sore, Pak, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan Pak Menteri beserta jajaran selama ini, jadi, sehingga seluruh aspirasi kami bisa terbangun dengan baik, terima kasih sekali lagi, Pak, dan tentunya catatan di sini bisa terus 2024 ini terkoneksi ke depannya siapapun pilar legislatifnya. Singkat saja Pak karena sudah sore, kami atas nama pribadi, terima kasih Pak Menteri atas dukungan di Dapil kami, dan dukungan untuk senior-senior.

Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Terima kasih Pak Herviano, minta resep ininya Pak, kok bisa jadi langsing *singset kayak gitu*.

**F-PDI PERJUANGAN (MOCHAMAD HERVIANO):**

Siap Ketua, kurangi karborhidrat.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Selanjutnya Pak Robert.  
Silakan Pak Ketua.

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Terima kasih, Ketua.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V yang saya hormati,  
Pak Saudara Menteri dan seluruh jajaran,  
Para Dirjen yang kami hormati dan kami banggakan,

Yang pertama, saya kira kita semua tahu bahwa tugas yang berat Pak Menteri dan seluruh jajaran ini sudah melewati. Kami sadar, maka kami tidak terlalu mengganggu. Kemarin IKN sudah jalan, targetnya 17-an sudah berhasil, semua berhasil dengan baik. Itu tanpa PUPR, itu tidak akan ada. Maka kami sebagai mitra, bangga dengan Saudara Menteri dan seluruh jajaran dengan hasil yang ada.

*Nah*, kami berikan apresiasi, maka mulai saat ini sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan yang mempunyai tanggung jawab di daerah, kami minta untuk Saudara Menteri dan seluruh jajaran, saat ini mari perhatikan kami. Inilah, kami semua yang ada ini, sudah memberikan semua kelonggaran yang begitu besar untuk proyek IKN, maka saat ini saya minta untuk mari lihatlah kami, kami masih membutuhkan perhatian khusus untuk program-program yang sudah kami janjikan kepada masyarakat.

Yang pertama, saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa, kalau kita bicara infrastruktur berbasis masyarakat, atau program kita yang kita namakan padat karya, itu 2023 karena kita berbasis kemarin dengan catatan kita bahwa harus sama dengan 2023, 2023 itu jumlah totalnya sekitar 14-an triliun, kalau saya melihat catatan yang ada, kemarin kita tambah 1, dari 7 jadi 8.

Saat ini, Saudara Menteri sudah sampaikan, bukan potensial, tetapi berpotensi, tetapi sudah ada 3 miliar, *eh* 3 triliun, dan masih berpotensi tadi kasih tahu bahwa ada 600 lagi yang bisa diambil, berarti 3,6. Maka, kalau itu ditambahkan dengan 8, masih *eh* sudah ada 11 koma sekian, hampir 12 triliun. Ya, maka apa yang disampaikan Pak Hamka tadi, penegasan itu yang mungkin nanti kami minta kepada Saudara Menteri bahwa semampu apa dari jumlah

yang harusnya 14 triliun itu dapat? supaya kita jangan terlalu bermimpi-mimpi lagi, total yang kita bisa dapat itu berapa, dan mari kita sepakat itu kemana saja ya, program ini, agar kita sudah bisa melihat dengan kemarin penambahan 1 triliun itu, kami ada tambah berapa ratus lagi, BPS yang ada di tempat kami. Maka kalau ini ada penambahan 3 lagi, ini mungkin bisa apa yang kami janjikan itu, semuanya bisa teralisasi ke Dapil kami. Maka, selaku Anggota Dewan, saya di Dapil saya, saya kira yang kami butuhkan, sangat dibutuhkan adalah BPS, dan saya minta supaya Kementerian PUPR juga bisa seperti Kementerian Desa.

Saya pernah dapat program desa wisata, tetapi saya sampaikan bahwa desa wisata di tempat saya tidak mungkin, karena harus menyerahkan aset wilayah rakyat itu ke pemerintah, itu tidak mungkin mereka serahkan, maka itu dirubah menjadi jalan lingkungan yang bisa saya lakukan. Maka, ini pun mungkin, kalau itu misalnya kami dapat P3-TGAI sekian, saya minta, saya, saya enggak usah P3-TGAI, saya nilai berapa, pindahkan ke BPS begitu. Jadi mungkin kita diberi kelonggaran itu, jadi kalau teman-teman yang mau mengambil itu, silakan, iya kan. Jadi ini..., ini saya kira yang perlu mungkin kita harus selesaikan.

*Nah*, jadi untuk itu, supaya kita tidak lagi berkeluh kesah terus kepada Saudara Menteri, sudah kesanggupannya sampai di sini. Misalnya, sekarang sudah 3,6 yang ditambahkan ya kan, mungkin bisa tambah sekitar 4,5, ya sudah tutup di situ, Pak Menteri ya kan, supaya kita bisa *closed* tidak lagi bermimpi-mimpi, dan sebagainya begitu. Jadi saya kira itu, saya kira, dan ya jadi itu yang perlu saya sampaikan Saudara Menteri.

Yang berikut, program-program yang sudah kami mendapat banyak sekali memang hambatan-hambatan yang sebenarnya itu tidak, tidak perlu ya kan, dari teman-teman yang di daerah ya kan, terutama di daerah saya. Memang daerah saya kan banyak daerah yang kalau dibilang daerah abu-abu, merah, putih ya kan. *Nah*, itu karena potensi keamanan di sana yang belum stabil. *Nah*, tetapi saya kira itu tidak menjadi satu halangan karena ada aparat, ada pemerintah daerah yang bisa menjamin itu semua, bahwa ini kita alokasikan di daerah yang memang mereka sudah jamin bahwa ini tidak, ini aman di sini ya kan.

*Nah*, terutama Bu Dirjen Cipta Karya, Bu Dirjen memang saya lihat tiap hari berdampingan dengan Presiden terus ya. Jadi, Ibu sibuk sekali di IKN, Ibu yang paling sibuk *gitu* ya. Ini sudah selesai, Bu, tolong perhatikan kami lagi, Bu, anak buah di bawah tadi juga sudah sampaikan, susah ya, yang lain kami komunikasi udah oke-okelah, tapi Bu Dirjen punya ini, ya mungkin karena Bu Dirjen sibuk di sana, mereka tidak dikontrol. Jadi, saya minta Bu Dirjen sudah selesai IKN, mari bersama kami, bantu kami ke daerah kami untuk bisa menyelesaikan utang-utang kami kepada masyarakat, janji-janji kami yang perlu kami selesaikan ya.

Yang berikut, Saudara Menteri, kami ini diberikan program rumah susun yang kami berikan ke daerah kami. Memang awal itu, nilainya tidak sesuai dengan daerah kami sebenarnya, harusnya sekitar 14-an, 15-an, tetapi cuman

h

ada 9, dan disampaikan karena ini harus kontrak supaya jangan hilang, nanti ada penambahan, dan itu dilakukan dan itu sudah jalan. Saya terima kasih, itu sudah jalan Saudara Menteri, sekarang tinggal penambahan sedikit saja Pak Menteri. Ini saya harapkan, saya sudah sampaikan kepada Dirjen Perumahan, mohon dukungan Pak Menteri ya, IKN bisa kami lepaskan, begitu banyak tambahan ya kan dari kami bahas ini tidak ada, begitu nongol 15 sekian triliun, kami juga tidak keberatan, semua kami dukung, masa yang punya kami yang kecil-kecil ini, cuman tambah 1, 2, 3 miliar, tidak bisa diberikan.

*Nah*, seharap saya, di dalam sisa anggaran ini, kami juga bisa dapat untuk bisa menyelesaikan rumah susun di daerah kami ini karena tidak jadi mangkrak nantinya ke depan, gitu. Jadi bisa diselesaikan agar bisa secepatnya bermanfaat untuk anak-anak sekolah yang akan nanti menggunakan itu karena itu kita berikan kepada anak-anak sekolah. Jadi sekolah berpola asrama yang kami berikan. Jadi harapan saya ini bisa segera juga dapat diselesaikan tahun 2024 ini.

*Nah*, baik. Yang berikut saya, tadi apa yang disampaikan Pak Sigit, Saudara Menteri, saya yang memimpin ke sana, dan sekali lagi, saya mohon kepada para Dirjen, Irjen, saya sengaja waktu itu saya undang. Saya pengin undang Irjen, dan saya ingin setiap kali saya mimpin yang namanya kunjungan, pengawasan, itu Irjen harus ikut karena bagian dari itu, agar apa yang kami lihat itu bisa dicatat oleh Irjen, karena Irjen tugasnya adalah pengawasan, bersama kami harusnya, tetapi tidak ada satu pun perwakilan dari Irjen yang hadir bersama saya di sana, saya terus terang kecewa pada waktu itu. Padahal, saya sudah wanti-wanti, minta supaya ikut, karena saya *pengin* lihat di sana dan apa yang kami selalu sampaikan di sini, kami mau buktikan, saya buktikan di sana, dan berhasil kami temukan seperti itu bahwa perusahaan dari luar datang ya kan, saya kasih bupati di sana berbicara, beliau sampaikan *uneg-unegya*.

Inilah, kami di sini cuma dapat kulit, tulang, dagingnya semua dibawa lagi kembali ke Jakarta. Itu disampaikan pada waktu itu, Pak Sigit saksi ya, teman-teman yang ikut ya, saya pimpin pada waktu itu. Selisihnya cuman 5 juta perak, diberikan kepada perusahaan dari Jakarta, padahal perusahaan lokal, ada. Bukan 5 miliar, 5 juta saja, itu diberikan. Ini mohon catatan untuk Dirjen Bina Konstruksi.

*Nah*, sekaligus Saudara Menteri, saya tadi saya pikir masih Dirjen Bina Konstruksi, ternyata sudah pindah lokasi, dan Saudara Menteri belum perkenalkan kita, Dirjen baru ya. Ya, ini ada pergantian baru, kami belum diperkenalkan. Ini sekarang jadi Dirjen Bina Marga, iya? *Nah*, ini di ujung ini ya, saya pun tadi cari-cari di mana Dirjen Bina Marga, kan ketahuan rambutnya juga putih, tidak kelihatan rupanya sudah dirubah.

Bina Konstruksinya siapa, Saudara Menteri? enggak hadir ya? *Oh* ya, oke ya. Jadi, mohon catatan penting ini Saudara Dirjen Bina konstruksi, ini yang terjadi di daerah kami semua itu, terjadi seperti itu, dan itu keluhan yang paling kami selalu mendapat keluhan besar daripada pengusaha-pengusaha lokal, anak-anak daerah, dan kami buktikan kemarin di sana, di Bali, saya buktikan

h

itu, saya tanya selisihnya, cuman 5 juta perak, dan ini tidak boleh terjadi. Jadi harapan saya, kalau sampai sudah terjadi tiga besar, apa ini, mungkin bisa konsultasi dulu kepada Pak Dirjen, iya kan, Pak Menteri, untuk melihat kalau itu ada pengusaha daerah yang cuman selisih begitu, berikanlah kepada pengusaha daerah.

Saya kira Pak Menteri pasti setuju, ya kan, selisihnya cuma 5 juta, masa kita tidak bisa menghargai orang daerah, iya. Jadi hal-hal ini yang kami temukan waktu kami pimpin di dalam kunjungan kerja kami ke Bali. Harapan kami, ini menjadi catatan penting untuk ke depan, tidak lagi ada kejadian-kejadian seperti itu ya.

Baik, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya harapkan kerja sama kita semua ya. Kita kemarin sudah sadar bahwa memang tanggung jawab besar PUPR terhadap proyek super penting yang Bapak Presiden inginkan bisa selesai secepatnya dan itu Pak Bas seperti tukang sulap, Pak Bas, sulap langsung jadi semuanya.

Padahal teman-teman kemarin baru pergi melihat, saya tanya gimana, saya waktu itu tidak ikut, *wah* tidak mungkin katanya, masih parah, tapi ternyata kemarin saya lihat, saya bangga dengan kerja teman-teman Kementerian PUPR ya, tetapi sudah itu sudah selesai, maka mari, saya lihat anggaran juga sekarang sudah berpihak kembali ya, cuman 100 sekian miliar untuk IKN, sudah bisa kembali lagi kita melihat kepada daerah-daerah untuk menjadi pemerataan dalam keadilan untuk pembangunan infrastruktur kita ke depan.

Terima kasih, Pimpinan dan selamat sore semuanya.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Makasih, Pak Roberth, selesai.  
Pak Ridwan ada? Cukup?  
Katanya simpan-simpan buat 2025, Pak.

Prinsip, jadi kembali ke saya Pak Menteri, pada dasarnya hanya *stressing* sedikit apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Harapan bahwa seharusnya kita berharap bahwa setiap kali pembahasan anggaran ini menjadi pengalaman 2025, sedapat mungkin pengalokasian anggaran untuk padat karya yang tadi dibicarakan itu, memang menjadi prioritas dalam pengalokasian anggarannya sehingga kemudian, kita tidak lagi harus menunggu hasil revisi atau hasil sisa lelang, tetapi untuk saat ini, kami berharap mudah-mudahan hasil sisa lelang yang ada, dapat mencukupkan kuota kepentingan teman-teman untuk di program-program padat karya.

Kemudian, saya sedikit ingin apa namanya, menyangkut masalah serapan anggaran, saat ini deviasi kita saya lihat tidak besar, cukup kecil, hanya kurang lebih 5%, Pak Menteri, dan ini lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Semoga pencapaian serapan anggaran Kementerian PUPR untuk tahun 2023,

2024 jauh lebih baik dibandingkan tahun 2023 yang kalau tidak salah 95%, 95,90%. Mudah-mudahan Ini bisa lebih besar lagi.

Saya mungkin saya enggak usah ngomong banyak-banyak, semuanya tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dan kita menunggu atau mempersilakan kepada Pak Menteri untuk menyampaikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan Anggota Komisi V tadi.

Kami persilakan, Pak Menteri.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Terima kasih, Pak Pimpinan.

Bapak-Ibu Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dan saya hormati,

Saya ingin merespon beberapa saja yang mungkin menjadi *concern* Ibu-Bapak sekalian, dengan tanpa mengurangi hormat saya pada seluruh Anggota Komisi V.

Yang pertama untuk Pak Hamka, tentang komunikasi antara kita, antara PUPR dan Komisi V DPR RI. Saya kira Mohon maaf Bapak, memang benar kita harus tetap menjaga *trust* kita. Jadi enggak ada persepsi apa-apa dari kami bahwa kami apa, apa ya, tidak memperhatikan Ibu-Bapak sekalian, enggak ada sama sekali Bapak, yang saya hanya bisa mendukung Bapak sekalian adalah dari program. Saya enggak pernah memberikan, *men-serve* Ibu-Bapak sekalian selain dari program.

Jadi program-program *Insyah Allah* akan kami penuhi apa, kami penuhi sesuai dengan kemampuan kita, dan itu untuk semua. Untuk itu, seperti Pak Syahrul sampaikan yang 3T untuk apa saja, saya ingin mengembalikan pada Bapak semua, silakan Bapak, nanti saya tugaskan Pak Sekjen untuk bisa mengalokasikan 3T itu untuk apa saja, karena IBN ini, bukan, IBM ini adalah dari P3-TGAI, BSPS, kemudian yang lainnya. Silakan Bapak mau yang mana yang mau diprioritaskan, nanti dari situ akan kita jabarkan, apa, program-program IBM. Jadi, kami tidak ingin mengalokasikan sendiri. *Oh*, ini BSPS sekian, tapi saya akan serahkan pada Komisi V. Nanti, Pak, Pak Sekjen yang akan menindaklanjuti.

Kalau itu bisa diterima, mudah-mudahan bisa menjadi solusi kita. Jadi Bapak-Ibu sekalian apa, enggak ada curiga pada kami itu untuk apa, untuk apa *gitu*. Jadi bukan curiga, tapi apa ya, *eh* tanda tanya. Ini *kok* kayak enggak transparan, untuk apa saya nutup-nutupi kayak *gitu*.

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Pimpinan, *nyuwun sewu*.

Pak Menteri, bukan curiga, tapi memang untuk pedoman. Saya terima kasih sudah ada kebijakan, itu artinya ditanyakan dulu kepada Anggota Dewan, kira-kira batas waktunya kapan, Pak, harus mengusulkan itu?

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Minggu ini mestinya.

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Dalam minggu ini?  
*Nggih*, siap Pak.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Karena baru kemarin kami temukan angka itu, ini sekarang sedang, sedang dilihat oleh Pak Sekjen, dan saya sudah perintahkan Pak Sekjen segera diputuskan, karena, mohon maaf, bukan mengembalikan masalah kepada, sering Anggota mengusulkannya terlambat, sehingga membuat SK Menteri-nya juga terlambat. Ya, makanya yang P3-TGAI kan baru tahap awal, tahap satu, nanti ada tahap duanya, karena tergantung pada usulan dari Bapak-Ibu sekalian. Itu yang pertama, Pak. Jadi mohon maaf Bapak Hamka kalau ada komunikasi yang selama ini ada *mis*.

Yang kedua, untuk Pak Ali Mufthi, tentang lelang dini. Saya setuju bahwa *planning, programming, budgeting system*, tapi ini strategi pelaksanaan. Jadi lelang dini, selalu kami lakukan pada saat November setelah *digedok* oleh Bapak di sini, kami langsung, DIPA-nya itu baru Januari, tapi pasti ada klausul di situ, bahwa ini akan jadi kalau ada DIPA-nya, enggak boleh nuntut, itu hanya untuk mempercepat pelaksanaan.

*Nah*, sama, sama aja dengan lelang dini untuk IJD ini, kami sudah digodok oleh Menteri Keuangan, akan ada. Jadi Inpres AMAL, 690, IJD hanya ada 900. *Nah*, ini kita lelangkan, supaya nanti kalau DIPA-nya jadi, langsung bisa kerja, karena kita sudah bulan Agustus ini. Kalau kita nunggu, DIPA, *e-katalog* itu, harus ada DIPA-nya dulu harusnya. Jadi kami tahu itu Pak, ya Pak. Ini hanya strategi pelaksanaan, mempercepat pelaksanaan. Ya, Pak, nanti uangnya dari Pak, Menteri, Ibu Menteri Keuangan, ok.

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Mohon maaf Pimpinan, mumpung Pak Menteri bicara IJD.

Pak, mohon bagaimana perkembangan IJD, saya dengarkan itu masih di Kementerian Keuangan yang menjadi kendala, kira-kira apa yang?

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**



Ya, itu tadi Bapak, jadi kami kan mengusulkan dua Inpres, Inpres air minum dan air limbah, dan Inpres lanjutan IJD tahun 2024. *Nah*, dua-duanya disetujui dengan jumlah anggaran, alokasi anggaran yang terbatas. *Nah*, sekarang yang sudah ada apanya, Bu?

**DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (IR. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):**

Surat tanggal 17 Agustus, 600.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Pakai *mic*, pakai *mic*.

**DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (IR. DIANA KUSUMASTUTI, M.T.):**

Mohon izin, Bapak Menteri.

Untuk Inpres Air Minum dan Air limbah, ini, baru mendapatkan persetujuan dari Ibu Menteri keuangan tanggal 17 Agustus tahun 2024 ini. Namun, dari usulan 3 triliun yang kita mintakan, kita hanya mendapatkan 696 miliar, dan kami sudah melakukan pelelangan.

Hari ini, kemarin, kami sudah menyurati ke Kementerian Keuangan untuk revisi, namun sampai dengan saat ini, kita belum mendapatkan SPRA-nya. Mudah-mudahan segera dapat SPRA-nya, demikian Bapak.

Terima kasih.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Terima kasih, Bu Dirjen.

Jadi semua kita lakukan dengan paralel, kalau semua harusnya sekuensial, harus ada ini dulu, ini dulu, tapi kalau ini enggak *nyampe*.

**F-PG (DRS.ALI MUFTHI, S.AG, M.SI.):**

Pimpinan.  
Terkait IJD, bagaimana Pak Menteri?  
Mohon dijelaskan.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

h



IJD, kita sudah ngusulkan juga, *ah* ini sudah bersamaan dengan pemberitahuan dari Menteri Keuangan 690 untuk AMAL, Air Minum dan Air Limbah, untuk IJD dikasih angka 900 miliar untuk tahap pertama ini.

Jadi, Beliau mengalokasikan dengan tahapan.

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Pimpinan, mohon maaf.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Dimaafkan, Pak, silakan.

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Saya akan mempertajam soal Inpres Jalan Daerah, Pak, karena IJD ini betul-betul *urgent* untuk di daerah. Saya dapat informasi 900 miliar itu baru persetujuan dari Kementerian Keuangan, tapi dananya pun belum diberikan, belum dicairkan.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Itu tadi yang Pak, kalau AMAL kan sudah kasih surat.

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Andai kata ini 900 miliar itu dicairkan, itu juga masih sangat, kurang jauh, Pak, tidak begitu, tidak begitu berarti untuk di daerah. Saya ingin bagaimana, Pak, kira-kira upaya supaya IJD dari Kementerian Keuangan itu bisa bertambah lagi, tidak hanya sekedar 900 miliar, apakah harus minta bantuan Pak Presiden karena ini antar lembaga, mohon maaf.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Jadi, dengan Pak Presiden, saya sudah, saya sudah sampaikan kepada Beliau, Pak, ini baru 900, ya sudah itu dulu dipakai. Jadi semua itu ada, karena Inpres itu kan sudah dengan Presiden, jadi Presiden, saya, Bu Menkeu, bertiga sudah ketemu, baru 900 Pak, ya udah itu, yang itu dulu dilaksanakan.

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Apa itu yang dimaksud sudah final hanya 900?

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Belum, belum, yang sudah itu.

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Ya, saya mohon, Pak, ini dengan Pak Menteri PUPR.

Terima kasih.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Siap, Pak, siap.

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Pimpinan, ya, minta izin Pak Dewo.

Jadi, saya kita bicara nilai, Pak Dewo, itu urusannya Beliau-Beliau, cuman yang kita bicarakan, bahwa usulan yang perlu kami bicarakan di sini, karena tolong reguler, bagian Bapak, tapi ada aspirasi juga, karena yang lalu kan seperti itu kami usulkan, tetapi sampai saat ini, kami belum pernah ada komunikasi dengan teman-teman di Bina Marga.

Harap saya, Pak Dirjen yang baru, supaya bisa kami, yang lalu kami disampaikan bahwa, Pak Roberth tolong menjadi, yang program pertama, proges dari Pak Roberth mana, kami sampaikan, oh ini, ini ya kan dengan DED yang diminta, kami siapkan semuanya. Harapan kami ini bisa terjadi lagi seperti itu. Jadi, bukan nilai duit yang ada, tapi turun pun kami cuma jadi penonton, untuk apa *gitu* kami bicarakan di sini, yang perlu itu kan, kami bisa karena Inpres itu kami revisi untuk kami bisa memberikan itu kepada daerah kami.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Paham, Pak.

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Makasih, Pak Menteri.

h

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Paham, paham, Pak.  
Sedikit menjawab Pak Dedi tentang kepastian IJD Bapak, jadi IJD.

**F-PG (DRS.ALI MUFTHI, S.AG., M.SI.):**

Sedikit Pak Pimpinan, masalah IJD.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Silakan.

**F-PG (DRS.ALI MUFTHI, S.AG., M.SI.):**

Boleh?

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Terakhir, silakan, Pak.

**F-PG (DRS.ALI MUFTHI, S.AG., M.SI.):**

900 miliar, dan saya punya keyakinan yang di-cover dalam program IJD itu mesti banyak karena dulu angkanya itu triliunan, sekarang hanya 900-an sekian. Ya, tolong di Dapil-Dapil ini diakomodirlah walaupun tak seberapa, Pak Menteri.

Hanya itu aja.

Makasih.

**F-PKS (H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T.):**

Izin.

Supaya senada dengan itu, supaya konkrit, kita minta daftarnya dari usulan kita supaya proporsional, karena kami juga mendengar sebagian usulan dari Anggota, sama sekali tidak ada respon, sementara sebagian *eh* sudah direspon dengan baik, *gitu*.

Oleh karena itu, kita minta daftar realisasi usulan dari seluruh Anggota supaya apakah realisasinya proporsional atau tidak.

Terima kasih, Pak.

h

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Paham Pak, terima kasih.

Kemudian yang yang ketiga untuk Pak Kyai Mahrum tentang anggaran di IKN. Jadi, IKN ini memang APBN memang tugasnya untuk membangun prasarana dasar. Jadi jalan, air minum, kemudian embung-embung, kemudian perkantoran sampai sekarang, apalagi ya, sampah, sanitasi.

APBN sekarang sudah berinvestasi sebesar 85 triliun kira-kira, dengan investasinya sampai dengan *groundbreaking* kemarin yang ketujuh, adalah 56 triliun. Saya kira ini, *loh* kok lebih kecil, saya kira tidak, karena APBN ini mulai dari nol, yang tadi dibidang dari hutan, kalau hutan pasti orang enggak mau investasi, jadi ini akan, ini terus berjalan. Nanti, September akan ada *groundbreaking* lagi apa, swasta-swasta yang akan terus karena sudah ada enam dari, saya melanjutkan, dari 472 yang menandatangani *letter of intent*, itu sekitar 220 yang *the real investor*, lainnya *tuh* kontraktor, *supplier*, konsultan. *Nah*, yang 220, dari 220 dievaluasi, ada 60 yang memang untuk mau investasi. Dari 60, ini sudah saya peta-in lagi, yang kemarin sudah 5 investasi, yang apa, bulan depan mudah-mudahan ada 7, atau 8 lagi, terus akan bertambah. Jadi itu Pak Kyai.

Kemudian dari, Pak, satu lagi dari Pak Syahrul tentang *blacklist*. *Blacklist* ini kami sudah pernah menyarankan, mengusulkan bersurat dengan kepada LKPP karena yang membuat regulasi tentang pengadaan barang dan jasa ini LKPP, PU tinggal *user*-nya saja. Jadi memang, yang *blacklist* itu hanya perusahaan, tidak termasuk *blacklist* terhadap personil, baik direktur maupun pengurus perusahaannya. Jadi kami setuju, sangat-sangat setuju kalau Komisi V bisa mendorong LKPP untuk *blacklist* kepada perusahaan, seperti halnya kalau KPBU, kalau yang misalnya *unsolicited* gagal, maka diulang lagi, pasti investor yang berafiliasi dengan yang pertama, sudah enggak boleh, itu di KPBU ada begitu. *Nah*, di *black*, *blacklist* di LKPP ini enggak ada, di LKPP Nomor 12 Tahun 2021, dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021.

Kemudian Pak Sadewo tentang Tol Demak-Tuban. Saya kira kita memang harus segera membangun itu, karena koridor di utara, karena untuk yang selatan dan utara ini memang jomplang apa, pembangunannya. Kita sedang menyiapkan *readiness criteria*-nya ini, mudah-mudahan tahun ini selesai. Kemudian memerlukan tanah sekitar 4 triliun, dan dukungan konstruksi 1 triliun, sedangkan analisa apa, *financial interest of return*-nya 11%, kami jadwalkan kuartal kedua 2022 ini, AMDAL-nya akan selesai, baru kita, baru kita bisa tenderkan. Saya kira itu Bapak yang bisa sampaikan.

*Nah*, yang paling penting saya kira untuk yang IBM tadi, kami akan menyerahkan 3 triliun tadi untuk diprioritaskan oleh Komisi V DPR RI sebelum dilakukan revisi DIPA-nya.

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Pimpinan, izin.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Kurang lebihnya, saya mohon maaf.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

*Walaikumsalam, Pak Menteri.*

Silakan yang terakhir, Pak, ya Pak Sudewo.

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

*Sing ditepuk tangan opo iki urung rampung.*

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Sudah, silakan, Pak.

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Pak Pimpinan, Pak Menteri, untuk Inpres, untuk Inpres SPAM, Pak, itu tolong ada ada informasi kepada kami alokasi-alokasinya, karena mengingat di daerah kami itu, masih banyak yang membutuhkan, Pak, pelayanan air minum Pak. Jadi, kalau bisa dibantu juga, Pak, di Kabupaten Pati.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Bapak Pimpinan.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Silakan, Pak.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Ini juga kami informasikan yang Inpres air minum ini diutamakan untuk memanfaatkan IPA-IPA regional yang sudah terbangun, yang belum dimanfaatkan. Jadi tidak membangun IPA baru, tapi menyambungkan ke

sambungan rumah dari IPA yang sudah, karena masih banyak IPA-IPA yang belum optimal dimanfaatkan.

Jadi, sebagai memanfaatkan *idle capacity*-nya, jadi tidak membangun IPA baru, tapi membangun sambungan rumah yang harusnya menjadi tanggung jawab PDAM atau kabupaten, kota, seperti halnya jalan daerah.

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Siap, Pak Menteri.

Izin, Pimpinan.

Kalau di Kabupaten Pati, ada yang memenuhi kriteria itu, bisa dibantu, Pak Menteri, siap nanti saya koordinasi dengan Bu Dirjen, mohon kalau Bu Dirjen dikontak, bisa respon.

Makasih.

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Nanti kalau sudah jadi bupati, belum jadi, jangan dulu ya. Saya, saya sudah usul lama *tuh*, Bu Dirjen.

Mohon maaf, Ketua, saya ambil alih sebentar.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Saya persilakan, Pak.

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Kami yang di Merauke kan waktu itu, saya sudah usulkan ya, itu masuk kriteria ini, jadi saya harapkan bahwa itu bisa mendapat....

**F-PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):**

Pimpinan, Pimpinan.

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Saya belum selesai, siapa ini?

**F-PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):**

Eenggak, mengingatkan, habis ini saya mau numpang ngomong juga.

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Oke, terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Silakan Pak Boy, silakan.

**F-PAN (H. BOYMAN HARUN, S.H.):**

Mengingatkan juga berkaitan dengan masalah air bersih ini, Bu Dirjen, yang sudah cukup lama saya pikir masalah untuk dari rumah, dari pipa induk ke rumah itu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang belum dibangun. Sudah 2 tahun itu, sudah reservoirnya dibangun, airnya sudah jalan, tapi untuk ke rumah belum dialirkan, Bu.

Terima kasih, Bu.  
Terima kasih, Pak Menteri.  
Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Terima kasih.

Saya kira cukup ya Pak. Mungkin kita sudah mendengarkan tanggapan dan jawaban dari Pak Menteri.

Selanjutnya, sesuai dengan Tatib Pasal 283, kita akan merumuskan kesimpulan atau keputusan rapat kerja pada hari ini.

Izin saya membaca,

Draf Kesimpulan Raker Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR), tanggal 21 Agustus 2024

1. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk meningkatkan capaian serapan APBN tahun anggaran 2024 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI, di mana capaian per 20 Agustus 2024 sebagai berikut: kementerian PUPR realisasi keuangan 41,72%, realisasi fisik 49,25%.

2. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/LKPP tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankan capaian opini tersebut di tahun mendatang.

3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk:

- a. Mempercepat realisasi program padat karya tunai tahun anggaran 2024;
- b. Melaksanakan percepatan realisasi Inpres Jalan Daerah serta Inpres Air Minum dan Air Limbah tahun 2024;
- c. Memprioritaskan pengusaha lokal dalam pelaksanaan proyek konstruksi di daerah;
- d. Meningkatkan program operasi, optimalisasi, dan rehabilitasi untuk memastikan infrastruktur yang telah dibangun dapat berfungsi optimal dan berkelanjutan.

Bagaimana Pak Menteri?

**F-PG (DRS. HAMKA B. KADY, M.S.):**

Izin, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Silakan Pak Hamka,

**F-PG (DRS. HAMKA B. KADY, M.S.):**

Poin a itu tidak ada padat karya tunai di PUPR, Pak, padat karya *ndak* ada bantuan tunai. Kalau IBM, Infrastruktur Berbasis Masyarakat ya, tidak ada padat karya tunai di PUPR, yang ada di Kementerian Desa.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Oke, ganti.

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Pimpinan, ingin menambahkan.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Ya, Pak Sudewo, silakan.

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Yang poin a ditambahkan sesuai dengan kesimpulan rapat pada tanggal 30 Agustus 2023, kalau enggak salah.



**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Ada dua, ada dua kesimpulan rapat yang sudah menyatakan itu....

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Pimpinan untuk....

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Sebentar.

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Mempercepat realisasi program padat karya, *kok* infrastruktur?

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

IBM, IBM.

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Sesuai dengan kesimpulan rapat pada tanggal 30 Agustus 2023.

**F-PKB (H. DEDI WAHDI, S. PD.):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Silakan, Kang Dedi.

**F-PKB (H. DEDI WAHDI, S. PD.):**

Mohon maaf, Pimpinan, Anggota, ini tinggal 40 hari lagi, Pimpinan. Jadi harus ada ketentuan waktu, Pimpinan, selambat-lambatnya tanggal sekian, *gitu loh*.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Tadi dijanji sama Pak Menteri, minggu ini, Pak, iya kan Pak Menteri?

h

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Pimpinan, yang tadi Pimpinan.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Iya, silakan Pak Sudewo.

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Yang tadi belum terjawab, selain IBM, Infrastruktur Berbasis Masyarakat, ada yang biasanya memang kita akom, akomodasi adalah, eh akomodir rusun, Pimpinan. Ini kan kalau hanya judulnya infrastruktur berbasis masyarakat, berarti enggak masuk Rusun nanti. Ini dipertegas saja, bisa tertampung *ndak* dengan angka 3 triliun itu.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Pak Menteri bisa, Pak, bisa jawab yang itu, Pak?

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Ibu-Bapak sekalian,

Saya ingin mengusulkan nomor 4 malahan.

Jadi Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR akan bersama-sama memprioritaskan program tambahan 3 triliun itu untuk padat karya tadi, Pak.

Jadi, nanti enggak ada pertanyaan lagi untuk yang Rapat Kerja nanti, bahwasannya ini sudah kita susun bersama. Kalau Rusun itu kan bukan padat karya, itu, itu, kalau itu program reguler. Iya, Pak?

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Iya, bisa tertampung tidak? Karena kemarin kan misalnya, kemarin itu, tahun kemarin, janji kita kan dua, nah mana tahu bisa ditampung satu, *gitu*, supaya jangan kita berhadapan dengan.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Enggak, Pak, kalau itu kan satu per satu kan, enggak bisa dimasukkan dalam kesimpulan.

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Iya, saya kira Rusun kita.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Kalau melihat anggaran yang ada, 3 triliun ini aja belum mampu mencukupi kuota yang sebelumnya seperti tahun 2024. Jadi, kalau kita kembali memasukkan masalah Rusun juga, saya kira semakin jauhlah dari targetan kita yang tadinya fokus untuk menyamakan 2023 dan 2024, alokasi kuota IBM tadi.

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Nanti, Rusun itu kita bicarakan untuk 2025-nya, ada *space*-nya nanti, ya.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Jadi, kalau butir 4 kalau memang mau tambahkan seperti Pak Dedi tadi, Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR sepakat untuk bersama-sama memprioritaskan anggaran 3 triliun tambahan untuk program, pakai tambahan, Pak, tambahan untuk program padat karya, selambat-lambatnya akhir Agustus 2024.

**ANGGOTA KOMISI V DPR RI:**

Itu baru top, makasih Pak Menteri, tepuk tangan.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Tepuk tangan dong, iya, iya.

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Pak Menteri, mohon Ketua,

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Masih ada lagi, Pak?

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Kalau bisa besok Pak Sekjen hadir ke sini, kami bicarakan itu.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATRI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Iya, kami tugaskan Pak Sekjen

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Ini Pak, kalau boleh tahu Pak, 3 triliun itu lebih kurang atau pas 3 triliun? Siapa tahu 3,9 atau berapa, *gitu?*

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATRI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Nanti polemik lagi ya itu,

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Tadi kan.

**ANGGOTA KOMISI V DPR RI:**

Enggak mungkin berkurang, Pak Ketua.

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Tadi sudah ada 600, berarti 3,6.

**ANGGOTA KOMISI V DPR RI:**

Bisa tambah, tidak mungkin berkurang.

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Jadi 3,6 lah.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Minimal 3 triliun.

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Pak, silakan Pak.

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Ya, ini perlu saya sampaikan supaya menjadi pegangan Sekjen ini, supaya nanti ketika kami koordinasi dengan Sekjen itu, tidak ke sana kemari lagi. Jadi yang dimaksud 3 triliun itu adalah soal, soal jenis dan jumlah.

Jadi, jangan sampai menanyakan lokusnya lagi begitu, hanya jumlah. Misalnya, BSPS menjadi sekian, P3-TGAI sekian, tidak usah harus ditanya alamatnya lagi begitu, nanti dimulai dari awal verifikasi lagi kan sulit. Jadi harus kita sepakat hanya masalah jumlah, *gitu* ya, tidak alokasi.

Makasih.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Oke, cukup ya?  
Cukup ya, cukup.

**ANGGOTA KOMISI V DPR RI:**

Cukup Pimpinan, cukup.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Mana? *Kok* pindah tempat lagi *nih*.  
Cukup ya?

**ANGGOTA KOMISI V DPR RI:**

Cukup Pimpinan, jangan bahas teknis lagi Pimpinan, pas itu.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Oke, oke, oke sudah pas, saya ketok ini.  
Bapak setuju? *Oh*, silakan.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Sebentar, hanya mungkin yang enggak perlu di kesimpulan, yang tadi mekanisme untuk antar Dapil tadi, Pak.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Oh, iya.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Saya mohon dengan sangat, ada tertulisnya, supaya ada dokumentasi di kami.

**F-NASDEM (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):**

Kami kembali seperti yang kemarin, Pak Sekjen ya, yang kami sudah sepakat waktu itu.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Ya, kalau antar Dapil, ada fraksi, ada pimpinan, salah satu aja yang penting ada dokumentasinya, tapi enggak mungkin, enggak perlu, enggak perlu, tidak harus di kesimpulan.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Iya, ini enggak ada kok, Pak, di kesimpulannya enggak ada.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Oke.

**ANGGOTA KOMISI V DPR RI:**

Kapoksi masing-masing, cukup

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Ya sudah, yang penting ada.

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Kita perjelas Pimpinan, kita perjelas permintaannya Pak Menteri bahwa itu cukup dengan melalui Kapoksi.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Atau Pimpinan Komisi lah, biar Pimpinan Komisi lah, Pak, kalau Kapoksi, nanti masing-masing bertabrakan lagi.

**F-GERINDRA (SUDEWO, S.T., M.T.):**

Lebih, lebih bagus, lebih tepat.

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Ya, oke, sepakat ya Pak? Setuju?  
Pak Menteri, setuju?  
Saya ketok ya Pak.

**(RAPAT: SETUJU)  
(KETOK PALU 1 KALI)**

Tepuk tangan dong, kita udah ketok, bagaimana *sih*?  
Baik.

Bapak-Ibu sekalian,  
Pimpinan Anggota Komisi V DPR RI,  
Pak Menteri PUPR serta jajaran yang kami hormati,

Dengan telah disepakatinya beberapa kesimpulan dan keputusan tersebut, maka rangkaian acara Raker pada hari ini telah kita selesaikan. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya rapat. Sebelum rangkaian acara hari ini kita tutup, kami berikan kesempatan kepada Bapak Menteri PUPR untuk menyampaikan sambutannya.

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):**

Terima kasih.

Bapak Pimpinan,  
Ibu-Bapak Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dan kami hormati,

Saya juga terima kasih atas kerjasamanya, bimbingannya, pada sampai dengan sore hari ini, dan mohon maaf juga atas nama rekan-rekan semua, rekan kami, untuk hal-hal yang kurang berkenan yang ada *seling surup*-nya itu bahasa Jawa-nya, Bapak kan orang Bugis, kan enggak ngerti *seling surup*-nya komunikasi, *acak kadut*.

Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi saya mohon dengan sangat, apa yang terjadi, tidak mengurangi kemesraan profesional kita, Pak, antara, antara PUPR dan Komisi V DPR RI.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (ANDI IWAN DARMAWAN, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI//F-GERINDRA):**

Terima kasih.

Pak Menteri,  
Bapak-Ibu sekalian,  
Saudara-Saudara Anggota Komisi V DPR RI,

Rangkaian acara rapat pada hari ini telah kita selesaikan. Semoga hal-hal yang telah kita diskusikan dan kita putuskan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Aamiin.

Apabila tidak ada hal lagi yang perlu kita bicarakan, maka rapat kerja pada hari ini kita tutup dengan ucapan terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.53 WIB)  
(KETUK PALU 3 KALI)**

Jakarta, 21 Agustus 2024  
a.n. **KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,**

TTD.

**NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.**  
NIP. 196912021998032002

h